

**PENERAPAN AKAD HAWALAH DALAM TRANSAKSI OVER
KREDIT MOBIL DITINJAU BERDASARKAN FATWA DEWAN**

SYARIAH NASIONAL NO: 12/DSN-MUI/IV/2000

(Studi Kasus di Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah



Oleh

LUBNA LAELATUL FARHAN

132311093

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2018

Drs. H. Muhyiddin, M. Ag.

Jl. Kanguru III/15 A Semarang

Raden Arfan R. M. Si.

Jl. Kanguru 1/1. A Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

di tempat

Assalamu'alaikum wr. wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Lubna Laelatul Farhan

NIM : 132311093

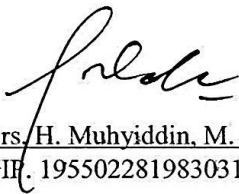
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul Skripsi : Penerapan Akad *Hawalah* dalam Transaksi Over Kredit Mobil Ditinjau Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah No. 12/DSN-MUI/IV/2000 (Studi Kasus Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka)

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat dimunaqosahkan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terimakasih.

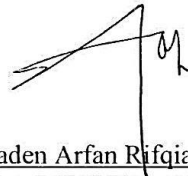
Wassalamu'alaikum wr. wb

Pembimbing I



Drs. H. Muhyiddin, M. Ag.
NIP. 195502281983031003

Pembimbing II



Raden Arfan Rifqiawan, SE., M., Si.
NIP. 19800610 200901 1 009



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III, Ngaliyan, Telp. / Fax. 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Lubna Laelatul Farhan
NIM : 132311093
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Skripsi : **Penerapan Akad Hawalah dalam Transaksi Over Kredit Mobil diTinjau Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 12/DSN-MUI/IV/2000 (Studi Kasus di Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka)**

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, dinyatakan Lulus pada tanggal:

10 Januari 2018

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Semarang, 19 Januari 2018

Mengetahui,

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Dr. Rokhmadi, M.Ag.

NIP. 19560518 199403 1 002

Drs. H. Muhyiddin, M.Ag.

NIP. 19550228 198303 1 003

Penguji I /

Penguji II

Supangat, M.Ag.

NIP. 19710402 200501 1 004

H. Tolkah, M.A.

NIP. 19690507 199603 1 005

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Muhyiddin, M.Ag.

NIP. 19550228 198303 1 003

Raden Arfan Rifqiawan, S.E., M.Si.

NIP. 19800610 200901 1 009

MOTTO

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَحِلُّوْا شَعۡيَرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهَرَ الْحَرَامَ وَلَا اِهۡدٰى وَلَا اَلۡقَلَبِدَ
وَلَا ءَامِيْنَ اَلْبَيۡتِ الْحَرَامِ يَبۡتَغُوْنَ فَضۡلًا مِّنۡ رَّبِّهِمْ وَرِضۡوَانًا وَاِذَا حَلَلْتُمْ
فَاَصۡطَادُوْا وَلَا تَجۡرِمَنَّكُمْ شَنَاۤىۡنُ قَوْمٍ اَنۡ صَدُوْكُمْ عَنِ الْمَسۡجِدِ الْحَرَامِ اَنۡ
تَعۡتَدُوْا وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ وَالتَّقۡوٰى ۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثۡمِ وَالْعُدۡوَانِ ۚ وَاتَّقُوا
اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيۡدُ الْعِقَابِ ﴿٢١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.(QS. Al-Maidah: 2)¹

¹ Perpustakaan Nasional RI, *Al-Quran dan Tafsirnya*, Jakarta: Widya Cahaya, 2015, h. 349.

PERSEMBAHAN

“Bukanlah suatu aib jika kamu gagal dalam suatu usaha, yang merupakan aib adalah jika kamu tidak bangkit dari kegagalan itu” (Ali bin Abi Thalib)

Alhamdulillah, Allah telah memberi rakit untuk berlabuh di samudra kehidupan. Meskipun terkadang terhempas ombak dan diterjang badai. Allah telah menuntun, menguatkan, untuk raih tanah tepi, untuk ribuan tujuan yang harus dicapai, untuk jutaan impian yang akan dikejar, untuk sebuah pengharapan, agar hidup jauh bermakna. Karya ini merupakan wujud dari kegigihan dalam ikhtiar mencari sebuah makna sempurna dengan tanpa berharap melampaui kemaha sempurna sang maha sempurna. kupersembahkan sebuah karya ini kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW. Dan teruntuk orang-orang terkasih yang selalu berada dalam kebahagiaan khususnya:

1. Keluarga peneliti, apa H. Ikin Sodikin dan mamah Hj. Layla Mudaim tercinta, yang tiada henti memberiku semangat, doa, dorongan, nasehat, kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat menghadapi rintangan. Apa dan mamah tersayang, kutata masa depan dengan doa mu, ku gapai cita dan impian dengan pengorbanan mu. Dan kasih yang tak terhingga dari teteh sulung untuk adik tercinta aa Hazmi Sidki Auva dan dede Fahmi Muhamad Sidki (aa, dede semoga tidak hanya nama yang tertera tanpa bisa merasakan tahap ini).
2. Setangkai bunga untuk kalian para sahabat yang selalu memberikan kebahagiaan dalam hidupku dan memberikan semburat warna di tugas ini. Kalian yang selalu ada disetiap keluh dan susah ku. Terimakasih yang tak terhingga untuk kalian yang telah menciptakan kombinasi warna dan rasa dalam cerita di kota ini. *Spam for* sahabat UNCH (kakak Lita, bunda Yesi, kakak Sibad, Atik klowor, say Izzat, say Upeh), kos Widiyarto (madam Ima, Lindut, Sasa), sahabat DAFA (kakak Tsani, kakak Iil, Idut, Finda dan bundo Umi) dan sahabat KKN posko 27 Banyubiru Kalian adalah keluarga dan rumah kedua bagiku.

3. Spesial untuk seseorang yang masih menjadi rahasia illahi, yang pernah singgah (M. Yasin Sidik) atau belum sempat berjumpa. Terimakasih untuk semuanya yang pernah tercurah untukku. Untuk seseorang yang selalu kusebut dalam doa, semoga keyakinan dan takdir ini terwujud, *biidznillah* jodoh akan dipertemukan atas ridho dan izin Allah SWT.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, peneliti menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 21 Desember 2017

Deklarator,



Lubna Laelatul Farhan

132311093

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ṣ	Es (titik atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (titik bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (titik atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zal	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (titik bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (titik bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (titik bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (titik bawah)
ع	‘Ain	‘ –	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena *Tasydid* Ditulis Rangkap:

متعقدين ditulis *muta‘aqqidīn*

عدّة ditulis *‘iddah*

III. Ta’ Marbutah di Akhir Kata

A. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

B. Bila Dihidupkan karena Berangkaian dengan Kata Lain, Ditulis

t: نعمة الله
ditulis *ni‘matullah*

ABSTRAK

Perkembangan jaman semakin pesat, setiap orang dituntut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi tidak semua orang memiliki harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Sehingga jika dalam keadaan terdesak untuk memenuhi kebutuhan hidup, orang akan membutuhkan pertolongan kepada orang lain. Dimana setiap orang tidak bisa lepas dari muamalah yang dapat mempermudah kehidupan manusia selayaknya tolong menolong dalam kebaikan (*tabarru'*). Dari sinilah muncul praktik tolong menolong yang diimplementasikan dalam akad *hawalah* seperti halnya transaksi over kredit mobil yang terjadi di Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka. Akan tetapi tidak semua transaksi over kredit mobil berjalan dengan lancar, karna sebagian besar masyarakat melakukan transaksi over kredit mobil secara terselubung dan dibawah tangan yang memuat pelanggaran perjanjian oleh debitur. Yang menjadi permasalahan peneliti adalah bagaimana penerapan *hawalah* dalam transaksi over kredit mobil dan tinjauan hukum Islam terhadap transaksi over kredit mobil berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.12/DSN-MUI/IV/2000 .

Adapun tujuan penelitian adalah (1) Untuk mengetahui penerapan akad *hawalah* dalam transaksi over kredit mobil di Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka, (2) Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap transaksi over kredit mobil berdasarkan Fatwa Dewan Syariah No:12/DSN-MUI/IV/2000.

Jenis metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analitik. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi dan wawancara terhadap 8 responden (3 *muhil*, 1 *muhil*, 3 *muhil 'alaihi* dan 1 makelar). Sedangkan untuk menganalisis data yang telah terkumpul peneliti menggunakan teknik normatif empiris dengan mengimplementasikan ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

Berdasarkan analisis data, dapat disimpulkan bahwa penerapan akad *hawalah* transaksi over kredit mobil di Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka tidak sesuai dengan rukun dan syarat akad berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 12/DSN-MUI/IV/2000. Dimana pihak bank *leasing* selaku *muhil* tidak mengetahui adanya transaksi over kredit mobil yang dilakukan debitur selaku *muhil* dan *muhil 'alaihi*. Sedangkan *shigat* dalam melakukan akad *hawalah* harus ada kesepakatan atau kerelaan dari pihak bank *leasing* selaku *muhil*. Dalam praktiknya transaksi over kredit mobil terdapat akad jual beli. Sehingga terdapat dua akad dalam satu transaksi yakni jual beli dan *hawalah*.

Kata kunci: *Hawalah*, Over kredit mobil

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat, inayah serta hidayah-Nya, kepada peneliti. Sehingga, peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan lancar. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda agung Nabi Muhammad SAW, beliau merupakan sosok suri tauladan dalam kehidupan bagi kita semua. Semoga kita termasuk golongan umat yang mendapatkan syafaatnya di *yaumul kiyamah*. Amin

Dengan tetap mengharap pertolongan, karunia, dan hidayah-Nya, Alhamdulillah peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagai persyaratan kelulusan Program Studi Strata I (SI) Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum di UIN Walisongo Semarang dengan judul, "PENERAPAN AKAD HAWALAH DALAM TRANSAKSI OVER KREDIT MOBIL DITINJAU BERDASARKAN FATWA DEWAN SYARIAH NO 12/DSN-MUI/IV/2000 (STUDI KASUS KECAMATAN SUKAHAJI KABUPATEN MAJALENGKA)". Peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan dan masih banyak mengalami kendala serta kekurangan. Dalam penulisan skripsi ini, peneliti sangat berterima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, saran serta kritik yang sangat membantu peneliti. Dalam kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak, ibu dan adikku tercinta yang telah membimbing dan tiada henti memberikan dorongan baik secara materiil maupun spiritual dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Drs. H. Muhyiddin, M.Ag dan Bapak R. Arfan Rifqiawan, SE., M.Si., selaku dosen pembimbing peneliti.

3. Bapak Afif Noor, S. Ag, S.H, M. Hum, dan Bapak Supangat, M. Ag, selaku kajar dan sekjur Hukum Ekonomi Syari'ah.
4. Bapak Dr. Akhmad Arif Junaidi, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Beserta Wakil Dekan I, II, dan III.
5. Bapak atau Ibu Dosen Pengajar dan Staf Karyawan di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membina dan membantu dalam penyelesaian proses perkuliahan.
6. Masyarakat Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka yang telah memberikan ijin dan bantuan kepada peneliti selama melakukan penelitian.
7. Teman-teman senasib seperjuangan jurusan Muamalah angkatan 2013, khususnya kepada MUA, MUB, MUC, dan MUD 13 yang selalu memberikan motivasi dan support dalam penyusunan skripsi ini.
8. Dan semua pihak yang tidak dapat peneliti sebut satu persatu yang telah menemani peneliti dalam penelitian skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah Nya. Kepada kami semua. Aamiin.

Semarang, 21 Desember 2017

Penulis,

LUBNA LAELATUL FARHAN

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vii
HALAMAN TRANSLITERASI.....	viii
HALAMAN ABSTRAK.....	x
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xi
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	18

BAB II GAMBARAN UMUM AKAD HAWALAH

A. Pengertian Akad Hawalah.....	20
1. Akad.....	20
2. Hawalah.....	32

B. Dasar Hukum Akad Hawalah.....	37
1. Hadis	37
2. Kaidah Fikih.....	38
3. Ijma	38
C. Rukun dan Syarat Akad Hawalah	39
1. Rukun Akad Hawalah	39
2. Syarat Akad Hawalah.....	43
D. Akibat Hukum Akad Hawalah	47
E. Berakhirnya Akad Hawalah	49
F. Relevansi Akad Hawalah dengan Qardh (hutang piutang)	52

BAB III PELAKSANAAN TRANSAKSI OVER KREDIT MOBIL DI KECAMATAN SUKAHAJI KABUPATEN MAJALENGKA

A. Profil Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka	56
1. Visi Misi.....	56
2. Sumber Daya Aparatur.....	59
3. Letak Geografis.....	62
4. Letak Demografis.....	63
5. Sarana Pelayanan Kesehatan.....	66
6. Sosial Ekonomi	69
B. Praktik Over Kredit Mobil di Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka	75

1. Latar Belakang Transaksi Over Kredit Mobil di Kecamatan Suakahaji Kabupaten Majalengka.....	75
2. Praktik Over Kredit Mobil di Kecamatan Kabupaten Majalengka	78

**BAB IV ANALISIS PENERAPAN AKAD HAWALAH
DALAM TRANSAKSI OVER KREDIT MOBIL
DI KECAMATAN SUKAHAJI KABUPATEN
MAJALENGKA DITINJAU BERDASARKAN
FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO :
12/DSN-MUI/IV/2000**

A. Penerapan Akad Hawalah Dalam Transaksi Over Kredit mobil di kecamatan Suakahaji	87
B. Analisis Transaksi Over Kredit Mobil di Tinjau Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No : 12/DSN-MUI/IV/2000	93

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	100
B. Saran-Saran	101

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial semacam ini merupakan fitrah yang ditetapkan oleh Allah SWT. Itu sebabnya, salah satu hal yang mendasar dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia adalah adanya interaksi sosial dengan manusia yang lain.¹

Dalam hal ini manusia tidak bisa terpisahkan satu sama lain untuk memperoleh kebutuhannya tanpa ada rasa tolong menolong antar sesama. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan dalam firman Allah: (QS. al-Maidah: 2)

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ

“.....Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.....”²

Dalam ayat tersebut Allah menganjurkan tolong menolong dalam hal kebaikan. Tolong menolong dalam muamalah adalah akad *tabarru'*. Pada hakikatnya akad *tabarru'* adalah akad melakukan kebaikan yang mengharapkan balasan dari Allah SWT semata.

Kehidupan manusia tidak lepas dari muamalah yang dapat mempermudah kehidupan manusia sebagaimana tujuan utama syariah. Kegiatan muamalah ini harus sesuai dengan ajaran Islam

¹ Nadzir Mohammad, *Fiqh Muamalah Klasik*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, h. 52.

² Perpustakaan Nasional RI, *Al-Quran dan Tafsirnya*, Jakarta: Widya Cahaya, 2015, h. 349.

yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadis, yaitu terhindar dari penyimpangan dan pelanggaran yang merusak kehidupan ekonomi dan hubungan sesama manusia, seperti *maysir*, *gharar*, dan *riba*.³

Dengan perkembangan jaman semakin pesat, setiap orang dituntut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi tidak semua orang memiliki harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Fakta inilah yang menyebabkan terjadinya transaksi hutang piutang.⁴ Dalam ajaran Islam hutang piutang diperbolehkan untuk menghindari *madharat* dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga jika dalam keadaan terdesak untuk memenuhi kebutuhan hidup, orang akan berhutang kepada orang lain dan yang bersangkutan berjanji akan melunasi pada waktu yang telah disepakati. Berdasarkan firman Allah: (Al-Baqarah: 282)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajurnya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang ditulis itu), dan hendaklah ia bertaqwa

³ Heru Wahyudi, *Fiqh Ekonomi*, Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung, 2012, h. 281.

⁴ Ghufroon Ajib, *Fiqh Muamalah II Kontemporer-Indonesia*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, h. 65.

kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada hutangnya...”⁵

Setiap orang yang meminjam sesuatu pada orang lain berarti peminjam memiliki hutang kepada yang berpiutang. Setiap hutang wajib dibayar sehingga berdosa orang yang tidak mampu membayar hutang, bahkan melalaikan pembayaran hutang juga termasuk perbuatan aniaya.⁶ Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
: مَطْلُ الْعِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيُتْبِعْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ
لِأَحْمَدَ "وَمَنْ أُحِيلَ فَلْيَحْتَلْ".

“Dari Abu Hurairah RA., ia berkata: Rasulullah SAW. bersabda: “penundaan pembayaran hutang bagi yang sudah mampu adalah suatu kezaliman. Dan barangsiapa di antara kamu hutangnya diserahkan kepada orang yang sudah mampu, maka terimalah itu.” (*Muttafaq ‘alaihi/Bulughul Maram: 902*). Menurut riwayat Ahmad: “Barangsiapa (hutangnya) dipindahkan, hendaknya ia menerima”⁷

Pada hadis tersebut Rasulullah memberitahukan kepada orang yang mengutangkan, jika orang yang berhutang menghawalahkan kepada orang yang kaya/mampu, hendaklah ia menerima *hawalah* tersebut dan hendaklah ia menagih kepada orang

⁵ Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014, h. 334.

⁶ Abdul Rahman Ghazaly, et al. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, h. 250.

⁷ Ahmad Muhammad Yusuf, *Ensiklopedi Tematis Al-Qur'an & Hadits Jilid 7*, Jakarta: Widya Cahaya, 2016, h. 77.

yang dihawalahkan (*muhal 'alaih*), Dengan demikian haknya dapat dipenuhi.⁸

Hawalah merupakan akad (perjanjian) yang menjamin pemudahan hutang piutang dari satu pihak kepada pihak lain⁹. Orang yang hutang (*muhil*) rela kalau tanggungannya dipindahkan kepada orang lain (*muhl 'alaih*), sedangkan orang lain (*muhal 'alaih*) yang disertai tanggungannya menerima dengan baik. Dengan adanya kerelaan dan penerimaan tersebut orang yang hutang (*muhil*) telah melepaskan kewajibannya dan orang yang menerima tanggungan (*muhal 'alaih*) telah siap menanggungnya. Sedangkan orang yang menanggung hutang (*muhil*) harus memberi tahu kepada orang yang berpiutang (*muhal*) untuk memudahkan pencarian.¹⁰

Hak *muhal* ada dalam tanggungan *muhil* sehingga haknya tidak dapat dipindahkan kecuali dia rela, karena sifat tanggungan dapat berbeda-beda, dan perkara menerima akad pemindahan hutang hukumnya sunah. Kerelaan mereka dapat diketahui dengan adanya ijab dan kabul.¹¹

Menanggung hutang piutang itu sah, asal sudah diketahui jumlahnya. Kepastian hutang menjadi salah satu syarat *hawalah*,

⁸ Heru Wahyudi, *Fiqh Ekonomi*, Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung, 2012, h. 283.

⁹ Sohari Sahrani, Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011, h. 149.

¹⁰ Moh. Rifa'I, at al. *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, Semarang: CV. Toha Putra, 1978, h. 204.

¹¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'I Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits*, Jakarta: PT Niaga Swadaya, 2012, h. 151.

artinya antara orang yang dihutangi (*muhal*) dengan orang yang dilimpahi pertanggungjawaban (*muhal 'alaih*) telah sepakat dan sepaham tentang jenis-jenis hutang, ukurannya, batas waktu pembayaran, cara pembayaran dan lain-lain. Dengan demikian diketahui secara pasti sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Lepasnya pertanggungjawaban dari orang yang hutang. Dengan pelimpahan tanggung jawab tersebut, orang yang hutang (*muhil*) sudah lepas dari tanggung jawabnya, dan orang yang disertai tanggung jawab (*muhal 'alaih*) mempunyai kewajiban penuh untuk memenuhi tanggung jawab itu.

Kalau orang yang dilimpahi tanggung jawab (*muhal 'alaih*) mengingkari kewajibannya, sehingga tidak bisa memenuhi kewajibannya, atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.¹²

Sedangkan praktik pelaksanaan akad *hawalah* di dalam transaksi over kredit mobil di Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka, tidak sesuai dengan norma syariah, karena terdapat unsur *gharar shigat* yakni dua akad dalam satu transaksi (*Al-jam'u baina bai'ataini fi bai'ah*), transaksi over kredit mobil merupakan transaksi jual beli bersyarat, dimana *hawalah* menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi dan *gharar* objek akad yakni tidak adanya kejelasan objek akad terhadap jumlah tunggakan yang belum

¹² Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014, h. 110.

disepakati. Dalam hal ini pihak pertama *muhal* tidak mengetahui adanya akad *hawalah*, berdasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 12/DSN-MUI/IV/2000 pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad) dan *hawalah* harus dilakukan dengan persetujuan *muhil*, *muhal*, dan *muhal* 'alaih.¹³

Seyogyanya *hawalah* merupakan akad *tabarru'* dimana akad *tabarru'* tidak membutuhkan imbalan, akan tetapi dalam penerapan akad *hawalah* pada transaksi over kredit mobil di Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka pihak *muhal* 'alaih harus memberikan uang muka (*down payment*) kepada *muhil* dengan sejumlah nominal yang sama ketika *muhil* membeli kendaraan secara kredit ke *muhal*.

Dengan adanya beberapa hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang akad *hawalah* dalam transaksi over kredit mobil berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 12/DSN-MUI/IV/2000 Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka, dan dengan ini penulis berpikir untuk menuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul: "PENERAPAN AKAD HAWALAH DALAM TRANSAKSI OVER KREDIT MOBIL DITINJAU BERDASARKAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 12/DSN-MUI/IV/2000 (STUDI KASUS KECAMATAN SUKAHAJI KABUPATEN MAJALENGKA)

¹³ *Ibid.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan di atas, maka penulis akan memfokuskan dalam beberapa pokok permasalahan, adapun pokok permasalahan yang akan di bahas pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana penerapan akad *hawalah* dalam transaksi over kredit mobil di Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap transaksi over kredit mobil berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No:12/DSN-MUI/IV/2000?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari adanya penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan akad *hawalah* dalam transaksi over kredit mobil di Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap transaksi over kredit mobil berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No:12/DSN-MUI/IV/2000

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis
Untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam hal akad-akad *syari'ah* terutama dalam akad *hawalah*. Dan mengetahui secara detail dan mendalam pelaksanaan akad *hawalah* di dalam transaksi over kredit.

2. Bagi Pembaca

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, bisa menjadikan tambahan pengetahuan terkait akad *hawalah* di dalam over kredit dan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

E. Telaah Pustaka

Sebelum penulis mengadakan penelitian ini penulis mencari karya tulis yang berkaitan dengan apa yang di bahas dalam penelitian untuk menghindari adanya kesamaan dalam penulisan ini, dengan itu penulis menemukan tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang di bahas pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hawalah di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Gedongkuning Yogyakarta*” oleh Siti Fatimah (03380405), Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Skripsi ini menjelaskan pelaksanaan akad *hawalah* di BMT BIF Gedongkuning yang memuat beberapa pembahasan mengenai subjek dan objek akad *hawalah* yang sah yakni *muhil* (anggota), *muhal* (rumah sakit, sekolah atau person) *muhal ‘alaihi* (BMT BIF Gedongkuning) sebagai subjek *hawalah* dan hutang yang dialihkan (*muhal bih*) dibolehkan meskipun tidak sama jumlah maupun kualitasnya menurut madzhab Hanafi. Sedangkan *shigat* akadnya tidak sah menurut Fatwa Dewan

Syariah Nasional No 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang *hawalah* karena salah satu yang berakad tidak mengetahui adanya akad *hawalah*¹⁴

Skripsi ini memiliki beberapa kesamaan yaitu dalam permasalahan *hawalah* dan *shigat* akad yang tidak sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No 12/DSN-MUI/IV/2000. Akan tetapi yang menjadi perbedaan, penelitian ini terfokus pada pelaksanaan akad *hawalah* dalam transaksi over kredit kendaraan dan dari segi permasalahan *shigat* yaitu *muhal* (bank *leasing*) yang tidak mengetahui adanya transaksi over kredit kendaraan.

2. Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Hiwalah” oleh Aris pambudi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Skripsi ini menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan akadnya, dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang *hawalah* menyebutkan bahwa pernyataan ijab dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad). BMT BRS dalam praktiknya hanya dilakukan oleh dua pihak saja yakni pihak BMT BRS dan anggota. Dalam pelaksanaan akad *hawalah*, pengenaan *fee* di BMT BRS tidak diperbolehkan. Hal ini dikarenakan akad *hawalah* termasuk

¹⁴ Siti Fatimah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hiwalah di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Gedongkuning Yogyakarta”, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Ypyakarta, 2008.

kedalam akad *tabarru'*. jika BMT BRS ingin mengenakan *fee* maka akad yang digunakan adalah *hawalah bil ujah* atau pembiayaan multijasa.¹⁵

Skripsi ini memiliki kesamaan pembahasan mengenai *hawalah* yang tidak sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah No 12/DSN-MUI/IV/2000. Dimana dalam praktiknya terfokus pada pelaksanaan akad *hawalah* di BMT BRS. Sedangkan dalam penelitian ini terfokus pada penerapan akad *hawalah* dalam transaksi over kredit mobil.

3. Skripsi dengan judul “*Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Take Over Di PT. Federal International Finance Syari’ah Cabang Kudus*” oleh Abdillah Chamidun (2104057), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.

Skripsi ini menjelaskan bahwa take over yang dilakukan di PT. FIF Syari’ah Cabang Kudus kurang sesuai dengan *hiwalah* karena sebelumnya penerimaan fasilitas baru tidak mempunyai hutang kepada pihak pertama. Penerima fasilitas sebagai *muhil*, penerima fasilitas baru sebagai *muhal ‘alaih*, pihak FIF Syari’ah sebagai *muhal* melakukan transaksi dengan iktikad baik dan berasaskan kebebasan berkontrak. Sedangkan dari segi objek yakni hutang yang dialihkan *muhal bih*, dibolehkan karena hutang sudah jelas baik dalam segi jumlah maupun jatuh temponya. Dari segi *sighat*, sesuai dengan ketentuan hukum

¹⁵ Aris Fambudi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Hiwalah*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2011.

Islam karena para pihak yang melakukan transaksi hadir dalam satu majlis dan para pihak sepakat tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.¹⁶

Persamaan antara penelitian ini dengan skripsi di atas adalah sama dalam bahasan seputar akad *hawalah*. Namun yang menjadi perbedaan skripsi ini secara keseluruhan telah sesuai berdasarkan syariat Islam, tidak halnya dengan pembahasan dari penelitian ini yang cenderung bertentangan secara hukum Islam dan hukum Positif.

4. Skripsi dengan judul “*Perspektif Hukum Islam Terhadap Pengalihan Hutang Kepada Pihak Ketiga*” oleh Nanik Rosyidah (96382497), Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Skripsi ini membahas tentang mekanisme perusahaan anjak piutang (*factoring*) ditinjau dari hukum Islam, yang dikaitkan dengan akad *hawalah*. Dimana penelitian ini terfokus pada mekanisme anjak piutang yang menjadi perbedaan dengan *hawalah* dan jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*)¹⁷ Sedangkan dalam penelitian ini terfokus pada

¹⁶ Abdillah Chamidun, *Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Take Over Di PT. Federal International Finance Syari'ah Cabang Kudus*, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2009.

¹⁷ Nanik Rosyidah, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Pengalihan Hutang Kepada Pihak Ketiga*, Fakutas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.

penerapan akad *hawalah* dalam transaksi over kredit mobil dan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*)

5. Skripsi dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Kredit Macet di Desa Jragung Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak*” oleh Diyah Umami Kulsum (12231107), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Skripsi ini membahas tentang jual beli motor kredit macet. Praktik jual beli motor kredit macet yang dilakukan oleh masyarakat Desa Jragung dilakukan dengan sederhana dan tertutup, yaitu dengan cara lisan tanpa adanya bukti hitam diatas putih. Motor tersebut masih milik perusahaan *leasing*. Sehingga, jual beli motor tersebut belum memenuhi syarat sah jual beli. Dengan begitu praktik jual beli motor kredit macet yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Desa Jragung tidak sesuai dengan syari'at Islam. Atau dengan kata lain tidak diperbolehkan (haram).¹⁸

Skripsi ini memiliki kesamaan dalam objek penelitian, yakni tentang permasalahan kredit macet dalam kendaraan. Akan tetapi yang menjadi perbedaan skripsi di atas terfokus pada akad jual beli. Sedangkan penelitian ini terfokus pada akad *hawalah* dalam persoalan kredit macet.

¹⁸ Diyah Umami Kulsum, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Kredit Macet di Desa Jragung Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016.

6. Jurnal dengan judul “*Al-Hawalah dan Relevansinya dengan Perekonomian Islam Modern*” oleh Suprihatin.

Bahwasanya jurnal ini membahas tentang keberadaan *hawalah* dan pengembangan dalam sistem perekonomian Islam modern. Dimana penerapan *hawalah* saat ini tetap mengacu pada sumber hukum Islam yang membolehkan melakukan pengalihan hutang, meski ada beberapa perubahan penambahan elemen *hawalah* dikarenakan adanya perbedaan latar pengembangan *hawalah* saat ini dengan *hawalah* pada saat awal pembentukannya. Relevansi konsep *hawalah* dengan perekonomian Islam modern terletak pada adanya fungsi bank syariah sebagai bagian dari struktur perekonomian Islam modern sebagai penyalur dana ke masyarakat yang posisinya dapat dikonversi menjadi *muhal ‘alaih* sebagai pembayar hutang.¹⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, jenis penelitiannya termasuk dalam penelitian kualitatif lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analitik. Data yang diperoleh seperti hasil pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan, analisis dokumen, catatan lapangan, disusun peneliti di lokasi penelitian, tidak dituangkan dalam bentuk dan angka-

¹⁹ Suprihatin, *Al-Hawalah dan Relevansinya dengan Perekonomian Islam Modern*, Masalah, vol.2, no. 1, Maret 2011.

angka. Peneliti segera melakukan analisis data dengan memperkaya informasi, mencari hubungan, membandingkan, menemukan pola atas dasar data aslinya (tidak ditransformasi dalam bentuk angka). Hasil analisis data berupa pemaparan mengenai situasi yang diteliti yang disajikan dalam bentuk uraian naratif.²⁰ Terhadap transaksi over kredit mobil di Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka.

Penelitian ini masuk kedalam penelitian hukum normatif-empiris atau sosiologi hukum. Penelitian hukum normatif empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.²¹ Pendekatan ini berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non-hukum bagi keperluan penelitian.²²

2. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

²⁰ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013, h. 87.

²¹ <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>, diakses 20 November 2017.

²² Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, h. 105.

a. Sumber data primer

Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.²³ Data ini berupa teks hasil wawancara dan diperoleh melalui wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sampel dalam penelitiannya.²⁴ Dengan ini penulis langsung melakukan wawancara kepada makelar dan pihak yang berakad yaitu *muhil*, *muhal* dan *muhal 'alaih* terkait over kredit mobil.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.²⁵ Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan. Data sekunder berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat/ mendengarkan. Data ini biasanya berasal dari data primer yang sudah di olah oleh peneliti sebelumnya.²⁶

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.*, Bandung: Alfabeta, 2009, h. 223.

²⁴ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006, h. 209.

²⁵ Sugiyono, *Metode ...*, h. 137.

²⁶ Sarwono, *Metode ...*, h. 209.

Dengan ini penulis sebagai tambahan dari data wawancara yaitu dengan dokumen-dokumen hasil dari peneliti sebelumnya yang sudah membahas terkait akad *hawalah* baik dalam lembaga keuangan maupun perusahaan (*factoring*).

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini, yaitu:

a. *Interview* (wawancara)

Wawancara merupakan suatu kegiatan Tanya jawab dengan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara (*interviewer*) dan yang diwawancarai (*interviewee*) tentang masalah yang diteliti, dimana pewawancara bermaksud memperoleh persepsi, sikap, dan pola pikir dari yang diwawancarai yang relevan dengan masalah yang diteliti. Karena wawancara itu dirancang oleh pewawancara maka hasilnya pun dipengaruhi oleh karakteristik pribadi pewawancara.²⁷ Wawancara dalam penelitian kualitatif sifatnya mendalam karena ingin mengeksplorasi informasi secara holistik dan jelas dari informan.²⁸

Dalam hal ini peneliti menggunakan jenis wawancara tidak berstruktur (*unstructured interview*). Dimana melakukan wawancara peneliti telah menyiapkan

²⁷ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013, h. 162.

²⁸ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013, h. 130.

instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama, dan peneliti hanya mencatatnya.²⁹ Peneliti dalam hal ini melakukan wawancara sebanyak 8 responden yaitu para pihak yang berakad (3 *muhil*, 1 *muhil*, 3 *muhil* 'alaih) dan makelar.

b. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang.³⁰ Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Hasil penelitian akan lebih dapat dipercaya jika didukung oleh dokumen. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber non insani. Sumber ini terdiri dari dokumen dan rekaman.³¹

Dengan ini penulis mengumpulkan data-data dari pelaksanaan transaksi over kredit mobil di Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka yaitu dalam bentuk gambar objek akad dan rekaman.

²⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Alfabeta, 2016, h. 73.

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: CV Alfabeta, 2009, h. 240.

³¹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013, h.176.

4. Analisis Data

Dalam menganalisis data pada penelitian ini, penulis melakukan analisis dengan beberapa tahap yaitu mengumpulkan data-data dari penelitian, kemudian mengkuaitatif data sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, menganalisis data penelilitan dengan teori yang ada di bab II, kemudian melakukan kesimpulan dengan hasil penelitian yang telah di lakukan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi dalam beberapa bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab I ini, penulis membahas beberapa hal, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam Bab II ini, penulis akan membahas tentang landasan teori mengenai konsep akad *hawalah*.

BAB III : PELAKSANAAN TRANSAKSI OVER KREDIT MOBIL

Dalam Bab III ini, penulis akan membahas profil Kecamatan Sukahaji dan praktik over kredit mobil di Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka.

BAB IV : PENERAPAN AKAD HAWALAH DALAM TRANSAKSI OVER KREDIT MOBIL DITINJAU BERDASARKAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO:12/DSN-MUI/IV/2000

Dalam Bab IV ini, yaitu berkaitan dengan pembahasan. Dengan ini penulis membahas tentang penerapan akad *hawalah* dalam transaksi over kredit mobil di Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka dan analisis penerapan akad *hawalah* dalam transaksi over kredit mobil di Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka ditinjau berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional no:12/DSN-MUI/IV/2000

BAB V : PENUTUP

Dalam Bab V ini, penulis akan membahas beberapa sub bab, yaitu kesimpulan, kritik dan saran.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG AKAD HAWALAH

A. Pengertian Akad Hawalah

1. Akad

Secara bahasa arti *al-qard* adalah perikatan, perjanjian, pertalian, pemufakatan (*al-ittifaq*).¹ Secara terminologi *fiqh*, akad didefinisikan dengan:

أَرْتِبَاطُ إِجْبَابٍ بِقَبُولٍ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يَنْبُتُ أَثَرُهُ فِي مَحَلِّهِ

“Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan”

Pencantuman kata-kata yang “sesuai dengan kehendak syariat” maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak *syara'*. Adapun pencantuman “berpengaruh pada objek perikatan” maksudnya adalah terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak yang lain (yang menyatakan qabul).²

Sedangkan akad menurut etimologis adalah: (1) mengikat (*ar-rabtu*), atau mengumpulkan dalam dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan jalan lain sehingga tersambung,

¹ Mohamad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, h. 32.

² Abdul Rahman Ghazaly, et al. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, h. 51.

kemudian keduanya menjadi bagian dari sepotong benda, (2) sambungan (*‘aqdatun*), atau sambungan yang memegang kedua ujung dan mengikatnya, (3) janji (*al-‘ahdu*), sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

“(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat) nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”. (QS. Ali ‘Imran [3]: 76).³

Perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak, tidak berpengaruh kepada janji yang dibuat oleh orang tersebut dan janji tetap mengikat orang yang membuatnya. Perkataan *‘aqdu* mengacu pada terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut, serta menyatakan suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, sehingga terjadilah perikatan janji dua buah janji (*‘ahdu*) dari orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dan yang lain, yang kemudian disebut perikatan (*‘aqd*).⁴

Akad adalah hubungan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibolehkan oleh syariat yang mempunyai pengaruh secara langsung. Ini artinya bahwa akad termasuk dalam kategori

³ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012, h. 19.

⁴ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012, h. 19.

hubungan yang mempunyai nilai menurut pandangan *syara'* antara dua orang sebagai hasil dari kesepakatan antara keduanya yang kemudian dua keinginan itu dinamakan ijab dan kabul.⁵ Atau dalam pengertian lain, akad merupakan keterkaitan antara keinginan kedua belah pihak yang dibenarkan oleh syariah dan menimbulkan implikasi hukum tertentu.⁶

Ijab kabul merupakan ucapan atau tindakan yang mencerminkan kerelaan dan keridhaan kedua pihak untuk melakukan kontrak/kesepakatan. Akad yang dilakukan harus berpijak pada aturan yang diberlakukan oleh *syara'*, jika akad bertentangan dengan tujuan *syara'* maka dilarang oleh *syara'*.⁷

Dari definisi tersebut mengisyaratkan bahwa, pertama, bahwa akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berpengaruh terhadap munculnya akibat hukum baru. Kedua, akad merupakan tindakan hukum dari kedua belah pihak. Ketiga, dilihat dari tujuan dilangsungkannya akad, ia bertujuan untuk melahirkan akibat hukum.⁸

a. Rukun Akad

Ulama Hanafiyah berbeda pendapat bahwa rukun akad adalah ijab dan kabul. Adapun orang yang mengadakan

⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Amzah, 2014, h. 17.

⁶ Nawawi, *Fikih...*, h. 20.

⁷ Mohamad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, h. 32.

⁸ Abdul Aziz, Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Amzah, 2014, h. 17.

akad atau hal-hal lainnya menunjang terjadinya akad tidak dikategorikan rukun sebab keberadaannya sudah pasti.⁹ Ulama-ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad itu ada empat:

- 1) Orang yang melakukan akad (*'aqid*);
- 2) Objek akad (*ma'qud 'alaih*);
- 3) *Shighat*¹⁰
- 4) Tujuan akad¹¹

b. Syarat sahnya akad

Syarat terbentuknya akad yang kemudian dikenal sebagai rukun akad memerlukan syarat agar dapat terbentuk dan mengikat antar pihak.

- 1) Syarat terbentuknya akad, dalam Hukum Islam syarat ini dikenal dengan nama *al-syuruth al-in'iqad*. Syarat ini terkait dengan sesuatu yang harus dipenuhi oleh rukun-rukun akad, yaitu:¹²
 - a) *Al-Aqid* atau pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Karena itu, orang gila dan anak kecil yang belum

⁹ Dimyauddin Djuaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h. 48.

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010, h. 115

¹¹ Mohamad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, h. 33.

¹² *Ibid.* h. 36.

mumayyid tidak sah melakukan transaksi jual beli, kecuali membeli sesuatu yang kecil-kecil atau murah.

- b) *Al-Ma'qud alaih* atau objek akad. Objek akad adalah *amwal* atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan masing-masing pihak.
- c) Tujuan pokok akad. Tujuan akad itu jelas dan diakui *syara'* dan tujuan akad itu terkait erat dengan berbagai bentuk yang dilakukan.¹³
- d) *Shighat* akad (pernyataan dan kehendak) adanya kesesuaian ijab dan kabulnya dilakukan dalam suatu majlis akad.¹⁴

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam *shighat al-'aqd* ialah:

- a) *Shighat al'aqd* harus jelas pengertiannya, kata-kata dalam ijab kabul harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian.
- b) Harus bersesuaian antara ijab dan kabul. Antara yang berijab dan menerima tidak boleh berbeda lafal.
- c) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain

¹³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Pranadamedia Group, 2015, h. 72.

¹⁴ Mohamad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, h. 36.

karena dalam *tijarah* (jual beli) harus saling merelakan.¹⁵

- d) Satu majlis akad (*majlisul 'aqd*), atau bisa dikatakan merupakan suatu kondisi yang memungkinkan kedua belah pihak untuk membuat kesepakatan atau pertemuan untuk membicarakan dalam satu objek transaksi. Dalam hal ini, disyaratkan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak menunjukkan adanya penolakan atau pembatalan dari keduanya.

Selanjutnya, Suhendi mengungkapkan bahwa mengucapkan dengan lidah (*lisan*) merupakan salah satu cara yang ditempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga cara lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad.¹⁶ Para ulama fikih menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam akad, yaitu:

- a) Dengan cara tulisan (*kitabah*), misalnya dua '*aqid* berjauhan tempatnya, maka ijab kabul boleh dengan *kitabah*. Atas dasar inilah para fukaha membentuk kaidah:

الْكِتَابَةُ كَالْخَطِّ

¹⁵ Abdul Rahman Ghazaly, et al. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, h. 53.

¹⁶ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012, h. 24.

“Tulisan adalah sama dengan ucapan”¹⁷

- b) Isyarat. Bagi orang-orang tertentu, akad atau ijab dan kabul, tidak dapat dilaksanakan dengan ucapan dan tulisan. Misalnya orang yang bisu tidak dan tidak pandai tulis baca tidak dapat melakukan ijab kabul dengan ucapan dan tulisan. Dengan demikian, kabul atau akad dilakukan dengan isyarat. Maka dibuatkan kaidah sebagai berikut:

الإِشَارَةُ تَقُومُ مَقَامَ الْعِبَارَةِ

“Tanda/isyarat menduduki kedudukan pernyataan yang diucapkan”¹⁸

- c) *Ta'athi* (saling memberi), seperti seseorang yang melakukan pemberian kepada seseorang dan orang tersebut memberikan imbalan kepada yang memberi tanpa ditentukan besarnya imbalan.
- d) *Lisan al-hal*. Menurut sebagian ulama, apabila seseorang meninggalkan barang-barang di hadapan orang lain, kemudian dia pergi dan orang yang ditinggali barang-barang itu berdiam diri saja, hal itu dipandang telah ada akad *ida'* (titipan) antara orang

¹⁷ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta: Pranadamedia Group, 2016, h. 101.

¹⁸ *Ibid*.

yang meletakkan barang dan yang menghadapi barang titipan ini dengan jalan *dalalah al-hal* (petunjuk).¹⁹

2) Syarat keabsahan akad, adalah syarat tambahan yang dapat mengabsahkan akad setelah syarat *in'iqad* tersebut terpenuhi. Setelah rukun akad terpenuhi beserta beberapa persyaratan yang menjadikan akad tersebut, maka akad terwujud. Akan tetapi ia belum dipandang syah jika tidak memenuhi syarat-syarat tambahan yang terkait dengan rukun-rukun akad, yaitu:

- a) Pernyataan kehendak harus dilakukan secara bebas, tanpa ada tekanan dari pihak-pihak tertentu.
- b) Pernyataan akad tidak menimbulkan *madharat*.
- c) Bebas dari *gharar* (tipuan).

Gharar secara operasional bisa diartikan; kedua belah pihak dalam transaksi tidak memiliki kepastian terhadap barang yang menjadi objek transaksi baik terkait kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan barang sehingga pihak kedua dirugikan.

Pengaruh *gharar* terhadap akad bisnis bisa terjadi baik dalam *shigat* akad atau dalam objek akad atau dalam syarat akad.

¹⁹ Abdul Rahman Ghazaly, et al. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, h. 53.

a) *Gharar* dalam *shigat* akad

Di antara *gharar* dalam *shigat* akad adalah:

1) *Al-jam'u baina bai'ataini fi bai'ah*
(menggabungkan dua akad dalam satu transaksi).

2) Akad jual beli atas objek yang tidak pasti.

Kedua akad di atas itu menjadi *fasid* karena adanya unsur *gharar* dalam *shigatnya*. Akadnya mengandung (*ta'liq aqd*), sehingga menjadikan objek akadnya tidak pasti terwujud.

b) *Gharar* dalam objek akad

Pertama, *gharar* yang terjadi pada objek akad (*mutsmān*).

Objek akad yang dimaksud adalah barang yang dijual dalam akad *bai'* atau barang (layanan) yang disewakan dalam akad *ijarah* atau objek usaha dalam akad *mudharabah*.

Gharar dalam barang yang menjadi objek transaksi meliputi hal-hal berikut:

- 1) Bentuk dan jenis objek akadnya tidak diketahui dengan jelas.
- 2) Objek akadnya tidak ditentukan.
- 3) Sifat objek akadnya tidak diketahui.
- 4) Jumlah barang itu tidak diketahui.

Transaksi dengan objek akad yang tidak diketahui jenis, sifat dan jumlahnya tersebut itu akadnya tidak sah (*fasid*) sesuai dengan ijma ulama yang menegaskan bahwa setiap transaksi yang tidak diketahui objek akadnya, maka akad itu tidak sah karena dalam transaksi ini ada ketidakjelasan yang bisa menyebabkan perselisihan (*jahalalah fahisyah*). Kedua, *gharar* yang terjadi pada harga (*tsaman*) atau upah (*ujrah*)

Di antara bentuk penerapannya adalah:

- 1) Menjual barang tanpa disebutkan harganya atau diserahkan kepada salah satu pihak akad.
- 2) Membeli sesuatu dengan uang yang ada di sakunya.
- 3) Membeli sesuatu dengan mata uang tertentu yang tidak disebutkan.

Menjual barang dengan upah yang tidak diketahui akadnya tidak sah, kecuali menjual barang dengan harga yang tidak ditentukan tetapi tingkat *ghararnya mughtafar* (ditolelir).²⁰

- 3) Syarat-syarat berlakunya akibat hukum (*al-syurut an-nafadz*) adalah syarat yang diperlukan bagi akad agar

²⁰ Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih & Ekonomi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015, h. 77-90.

akad tersebut dapat dilaksanakan akibat hukumnya.

Syarat-syarat itu adalah:

- a) Adanya kewenangan mutlak atas objek akad
 - b) Adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan.
- 4) Syarat mengikat (*al-syarath al-luzum*), sebuah akad yang sudah memenuhi rukun-rukunnya dan beberapa macam syarat sebagaimana yang dijelaskan di atas, belum tentu membuat akad tersebut dapat mengikat pihak-pihak yang melakukan akad.²¹
- c) Tahapan akad menurut jumhur

Mayoritas ulama tidak membedakan antara kekurangan (*khalal*) dalam rukun dan syarat akad atau dalam sifat akad menurut mereka, hanya ada dua bentuk akad, yaitu:

- 1) Akad *shahih*, yaitu akad yang memenuhi rukun, syarat dan sifat akad. Akad tersebut dinamakan menjadi akad *mun'aqid* dan akad sah.
- 2) Akad *bathil*, yaitu akad yang tidak memenuhi rukun, syarat dan sifatnya, maka akad tersebut dinamakan menjadi akad tidak sah juga akad *fasid* dan akad *bathil*

²¹ Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, h. 37.

dalam waktu yang sama, karena istilah *fasid* dan *buthlan* adalah sinonim akad tidak sah.²²

d) Berakhirnya Akad

Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Selain telah tercapainya tujuan, akad dipandang berakhir apabila terjadi *fasakh* (pembatalan) atau telah berakhir waktunya.

Fasakh terjadi dengan sebab-sebab berikut:

- 1) Di-*fasakh* (dibatalkan), karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan *syara'*, seperti yang disebutkan dalam akad rusak, misalnya, jual beli barang yang tidak memenuhi syarat kejelasan.
- 2) Dengan sebab adanya *khiyar*, baik *khiyar rukyat*, cacat, syarat, atau majelis.
- 3) Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena menyesal atas akad yang baru saja dilakukan. *Fasakh* dengan cara ini disebut *iqalah*. Dalam hubungan ini Hadis Nabi Riwayat Abu Daud mengajarkan, bahwa barangsiapa mengabulkan permintaan pembatalan orang yang menyesal atas akad jual beli yang dilakukan, Allah akan menghilangkan kesukarannya pada hari kiamat kelak.

²² Oni Sahroni & M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016, h. 98.

- 4) Karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
- 5) Karena habis waktunya.
- 6) Karena tidak dapat izin pihak yang berwenang.
- 7) Karena kematian.²³

2. *Hawalah*

Secara bahasa, *hawalah* berarti *al-intiqal* (memindahkan) dan *al-tahwil* (mengalihkan). Menurut al-Juzayri, *hawalah* secara bahasa berarti:

النَّقْلُ مِنْ مَحَلٍّ إِلَى مَحَلٍّ

“pemindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain.”²⁴

Hawalah menurut istilah yang dikenal di kalangan *fuqaha*’ (ahli hukum) dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh suatu negara adalah pengalihan piutang dari satu tanggungan ketanggungan yang lain.

Sedangkan secara terminologi, para ulama mendefinisikan *hawalah* sebagai berikut:

- a. Menurut Hanafiyah, yang dimaksud *hawalah* ialah:

نَقْلُ الْمَطَا لَبَةِ مِنْ ذِمَّةِ الْمَدْيُونِ إِلَى ذِمَّةِ الْمُتَزَمِّ

“Memindahkan tagihan dari tanggung jawab yang berhutang kepada yang lain yang punya tanggung jawab kewajiban pula.”²⁵

²³ Madani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, h. 99.

²⁴ Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015, h.136.

- b. Syafi'iyah dan Hanabilah memberikan definisi *hawalah* sebagai berikut.

الْحَوَالَةُ نَقْلُ الْحَقِّ مِنْ ذِمَّةِ الْمُحِيلِ إِلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ

“Hawalah adalah memindahkan hak dari tanggungan muhil kepada tanggungan muhal ‘alaih.”

- c. Sayid Sabiq memberikan definisi *hawalah* sebagai berikut:

الْحَوَالَةُ نَقْلُ الدَّيْنِ مِنْ ذِمَّةِ الْمُحِيلِ إِلَى ذِمَّةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ

“Hawalah adalah memindahkan hutang dari tanggungan orang yang memindahkan (al-muhil) kepada tanggungan orang yang dipindahi hutang (muhal ‘alaih)²⁵

- d. Wahbah al-Juhaili berpendapat, *hawalah* adalah pengalihan kewajiban membayar hutang dari beban pihak pertama kepada pihak lain yang berutang kepadanya atas dasar saling mempercayai.
- e. Imam Taqiyyudin berpendapat, *hawalah* adalah pemindahan hutang dari beban seseorang menjadi beban orang lain.
- f. Idris Ahmad berpendapat, *hawalah* adalah semacam akad (*ijab kabul*) pemindahan hutang dari tanggungan seseorang yang berhutang kepada orang lain, itu mempunyai hutang pula kepada orang lain, dimana orang lain itu mempunyai hutang pula kepada yang memindahkan²⁷

²⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010, h.99.

²⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010, h.447.

²⁷ Heru Wahyudi, *Fiqh Ekonomi*, Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung, 2012, h. 282.

g. Syihabudin al-Qalyubi berpendapat bahwa yang dimaksud *hiwalah* adalah akad atau transaksi yang menetapkan pemindahan beban hutang dari seseorang kepada yang lain nya.²⁸

Dalam istilah ulama fiqih, *hawalah* merupakan pemindahan beban hutang dari *muhil* (orang yang berhutang) menjadi tanggungan *muhal 'alaih* (orang yang berkewajiban membayar hutang).²⁹ Sedangkan *hawalah* menurut pasal 29 ayat (13) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah pengalihan hutang dari *muhil* kepada *muhal 'alaih*.³⁰

Adapun menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 58/DSN-MUI/V/2007 tentang *hawalah bil-ujrah*, *hawalah* adalah pengalihan hutang dari satu pihak ke pihak lain, terdiri atas *hawalah muqayyadah* dan *hawalah muthlaqah*. *Hawalah muqayyadah* adalah *hawalah* dimana *muhil* adalah orang yang berhutang sekaligus berpiutang kepada *muhal 'alaihi* sebagaimana yang dimaksud dalam Fatwa No.12/DSN-MUI/IV/2000 tentang *hawalah*. Sedangkan *hawalah muthlaqah*

²⁸ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, h.254.

²⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar: 2010, h.258.

³⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, h.265.

adalah *hawalah* dimana *muhil* adalah orang yang berhutang tetapi tidak berpiutang kepada *muhal* ‘*alaihi*.³¹

Hawalah Muthlaqah tidak diperbolehkan oleh para ulama, kecuali ulama Hanafiyah. Alasan ulama (tiga madzhab selain Hanafiyah) yang melarang *hawalah* semacam ini adalah karena orang yang dipindahkan pembayaran hutang (*muham* ‘*alaih*) tidak ada hubungan dengan orang yang memindahkan hutang (*muhil*). Artinya ia tidak mempunyai kewajiban yang harus ditanggung dan dibayarkan kepada *muhil*, sehingga jika hal ini terjadi berarti bukan *hawalah*, melainkan *kafalah*.³²

Keabsahan *hawalah* dilegitimasi dalam Surat Al-Ma’idah ayat 2:

وَتَعَاوُنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ
...وَالْعُدْوَانِ ۚ

“.....Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.....”³³

Berdasarkan ayat diatas *hawalah* merupakan jenis akad *Tabarru* yaitu akad yang dimaksudkan untuk menolong dan murni semata-mata karena mengharapkan ridha dan pahala dari

³¹ Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 58/DSN-MUI/V/2007 Tentang Hawalah Bil Ujrah*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014, h. 348

³² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012, h. 182.

³³ Perpustakaan Nasional RI, *Al-Quran dan Tafsirnya*, Jakarta: Widya Cahaya, 2015, h. 349.

Allah SWT, sama sekali tidak ada unsur mencari “*return*” ataupun motif. Atau segala macam perjanjian yang menyangkut *nonprofit transaction* (transaksi nirlaba), transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil.³⁴

Sedangkan hadis yang mengabsahkan akad *hawalah* adalah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُ
الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

“Dari Abu Hurairah RA dari Nabi SAW bersabda: “Penangguhan orang kaya (dalam membayar hutang) adalah suatu kedzaliman. Akan tetapi apabila salah seorang kalian dialihkan hutangnya kepada orang yang mampu, maka hendaklah dia menerima.” *Muttafaq Alaihi*³⁵

Dalam hadis ini Rasulullah memerintahkan kepada orang yang menghutangkan, jika orang yang berhutang menghawalahkan kepada orang kaya dan berkemampuan, hendaklah menerima *hawalah* tersebut dan menagihnya kepada *muhal ‘alaih*.

Kebolehan *hawalah* ini didasarkan pula pada *ijma’* dikalangan ulama. Para ulama sepakat bahwa hukum *hawalah* itu adalah boleh. *Hawalah* dibolehkan pada hutang yang tidak berbentuk barang/benda, karena *hawalah* adalah perpindahan

³⁴ Madani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, h. 77.

³⁵ Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abdul Hadi Al-Maqsidi, *Ensiklopedi Hadits-Hadits Hukum*, terj. Suharlani dan Agus Ma'mun, Jakarta: Darus Sunah Press, 2013, h. 991.

hutang, oleh sebab itu harus pada hutang atau kewajiban finansial.³⁶

B. Dasar Hukum Akad Hawalah

1. Hadis

Pengalihan pinjaman (*hawalah*) diperbolehkan, hanya saja jika penerima pengalihan (*muhal*) dialihkan untuk menagih orang kaya yang menunda pembayaran hutangnya, ia harus menerimanya.³⁷ Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أَتَبَعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ "وَمَنْ أُحِيلَ فَلْيَحْتَلْ".

“Dari Abu Hurairah RA., ia berkata: Rasulullah SAW. bersabda: “penundaan pembayaran hutang bagi yang sudah mampu adalah suatu kedzaliman. Dan barangsiapa di antara kamu hutangnya diserahkan kepada orang yang sudah mampu, maka terimalah itu.” (*Muttafaq ‘alaihi/Bulughul Maram: 902*). Menurut riwayat Ahmad: “Barangsiapa (hutangnya) dipindahkan, hendaknya ia menerima³⁸

Pada hadis tersebut Rasulullah memberitahukan kepada orang yang mengutangkan, jika orang yang berhutang menghawalahkan kepada orang yang kaya/mampu, hendaklah

³⁶ Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015, h.137.

³⁷ *Ibid.* h. 180.

³⁸ Ahmad Muhammad Yusuf, *Ensiklopedi Tematis Al-Qur'an & Hadits Jilid 7*, Jakarta: Widya Cahaya, 2016, h. 77.

ia menerima *hawalah* tersebut dan hendaklah ia menagih kepada orang yang dihawalahkan (*muhal 'alaih*), Dengan demikian haknya dapat dipenuhi.³⁹

2. Kaidah Fikih

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ إِلَّا بَاحَةَ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“ Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan”⁴⁰

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Bahaya (beban berat) harus dihilangkan”⁴¹

3. Ijma

Adapun *Ijma*’ maka secara garis besar seluruh ulama sepakat bahwa *hawalah* adalah boleh. Akad *hawalah* boleh dilakukan terhadap *ad-Dain* (harta yang masih berbentuk hutang), bukan terhadap *al-‘Ain* (harta yang barangnya berwujud secara konkrit, biasanya diartikan barang), atau dengan kata lain akad *hawalah* sah apabila *muhal bih* bukan berupa hutang barang (*al-‘Ain*). Karena akad *hawalah* memiliki arti *an-Naqlu* atau *at-Tahwiil* (memindahkan atau mengalihkan), dan hal ini hanya bisa dilakukan terhadap harta yang masih berbentuk hutang, tidak bisa dilakukan terhadap *al-‘Ain* (barang) , sehingga tidak sah mengadakan akad *hawalah* terhadap *al-‘Ain*.⁴²

³⁹ Heru Wahyudi, *Fiqih Ekonomi*, Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung, 2012, h. 283.

⁴⁰ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta: Pranadamedia Group, 2016, h. 130.

⁴¹ *Ibid*

⁴² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Darulfikir, 2011, h. 86.

C. Rukun dan Syarat Akad *Hawalah*

1. Rukun *Hawalah*

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO:12/DSN-MUI/IV/2000 rukun *hawalah* adalah:

- a. *Muhil* (orang yang berhutang dan berpiutang)
- b. *Muhal* (orang yang berpiutang kepada *muhil*)
- c. *Muhal 'Alaih* (orang yang berhutang kepada *muhil* dan wajib membayar hutang kepada *muhal*)
- d. *Muhal Bih* (hutang *muhil* kepada *muhal*)
- e. *Sighat* (ijab-kabul). Dalam ijab kabul akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.⁴³

Rukun *hawalah* menurut pendapat Madzhab Imam Hanafi adalah, ijab dari pihak *muhil*, kabul dari pihak *muhal*, dan '*muhal 'alaihi* dengan bentuk-bentuk perkataan tertentu. Ijab adalah seperti pihak *muhil* berkata kepada pihak *muhal*, "saya mengalihkanmu kepada si fulan". Sedangkan kabul dari pihak *muhal* dan *muhal 'alaihi* adalah masing-masing berkata, "saya menerimanya" atau "saya setuju", atau kata-kata yang semakna.

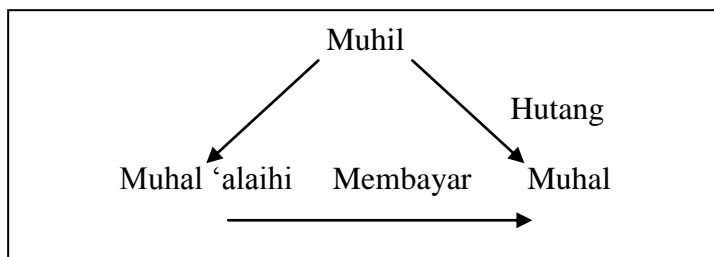
Salah satu alasan kenapa akad *hawalah* harus berdasarkan persetujuan pihak *muhal 'alaihi* menurut Madzhab

⁴³ Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 12/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Hawalah*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014, h. 110

Hanafiyyah adalah, karena akad *hawalah* merupakan sebuah bentuk *pentasharufan* atau tindakan yang dilakukan terhadap *muhal 'alaihi* dengan memindahkan hutang kedalam tanggungannya. Oleh karena itu, akad *hawalah* tidak bisa sempurna kecuali dengana adanya kabul atau persetujuan dari pihak *muhal 'alaihi*.

Adapun alasan persetujuan pihak *muhal*, maka hal ini memang sudah menjadi keharusan. Karena hutang yang ada adalah haknya, yaitu yang ada dalam tanggungan pihak *muhil*. Dan hutang itulah yang nantinya mengalami perpindahan dengan adanya akad *hawalah*. Sedangkan di dalam masalah penunaian tanggungan atau hak, ditemukan adanya keragaman antara satu orang dengan orang yang lain, ada yang selalu tepat dalam menunaikan hak dan mudah ditagih, dan ada pula yang gemar menunda-nunda dan susah sekali ditagih.

Secara garis besar praktik *hawalah* dalam konsep dasar fikihnya sebagai berikut:



Gambar 1. Skema *hawalah* dalam konsep Madzhab Hanafiah

Penjelasan:

A (*muhil*) berhutang kepada B (*muhal*). Kemudian, A mengalihkan hutangnya kepada C, sehingga C berkewajiban membayar hutang A kepada B, tanpa menyebutkan bahwa pemindahan hutang tersebut sebagai ganti rugi dari pembayaran hutang C kepada A.

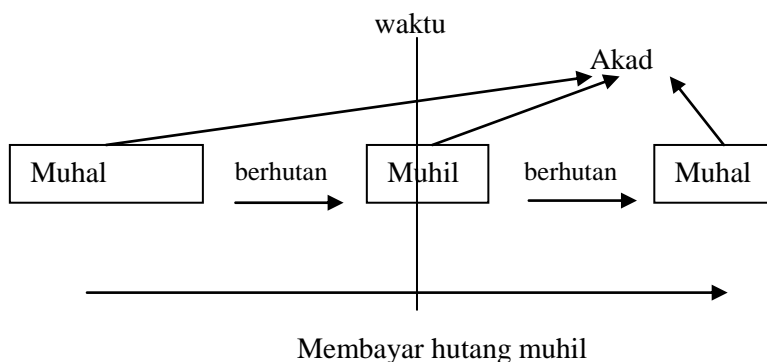
Sementara itu, ulama Hanabilah dan ulama Zhahiriyyah berpendapat bahwa di dalam akad *hawalah* hanya disyaratkan ridha pihak *muhil* saja, sedangkan pihak *muhal* dan *muhal 'alaihi*, mereka berdua mau tidak mau harus menerimanya.

Alasan kenapa tidak disyaratkan harus adanya kerelaan dan persetujuan dari pihak *muhal 'alaihi* adalah, karena pihak *muhil* bisa meminta sendiri haknya atau bisa dengan wakilnya. Disini, pihak *muhil* memposisikan pihak *muhal* pada posisinya dalam hal memegang dan menerima pembayaran hutang (dengan kata lain memposisikannya sebagai wakilnya untuk menagih dan mendapatkan haknya dari *muhal 'alaihi*). Karena itu, pihak *muhal 'alaihi* harus menyerahkan pembayaran hutang yang ada kepada pihak *muhal* yang posisinya sebagai wakil pihak *muhil*.

Sementara itu, Madzhab Malikiyyah berdasarkan pendapat yang masyhur menurut mereka dan Madzhab Syafi'iyah berdasarkan pendapat yang lebih shahih menurut mereka, mengatakan bahwa syarat sahnya akad *hawalah*

hanyalah ridha pihak *muhil* dan pihak *muhal* saja. Karena pihak *muhil* bebas menutupi hutang yang ada dari arah mana saja yang dikehendakinya dan pihak *muhal* memiliki hak yang berada di dalam tanggungan pihak *muhil*, sehingga haknya tidak bisa berpindah kecuali atas persetujuannya.⁴⁴

Ketika akad *hawalah* telah disepakati, maka *muhil* terbebas dari tuntutan hutang dari pihak *muhal*. Penagihan hutang akan berpindah dari pihak *muhil* kepada *muhal* 'alaih, artinya ketika *muhal* ingin menagih hutang, maka ia harus datang kepada *muhal* 'alaih, bukan kepada *muhil*.⁴⁵



Gambar 2. Skema *hawalah* dalam konsep Madzhab Syafi'iyah

⁴⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Darulfikir, 2011, h. 86-57.

⁴⁵ Dimayauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h.260-261.

Penjelasan:

Umpamanya A (*muhil*) berhutang kepada B (*muhal*) dan ia (A) berpiutang kepada C (*muhal 'alaihi*). Jadi A adalah orang yang berhutang dan berpiutang, B hanya berpiutang, dan C hanya berhutang. Kemudian A dengan persetujuan B menyuruh C membayar hutangnya kepada B, tidak kepadanya (A); setelah terjadi akad *hawalah*, terlepaslah A dari hutangnya kepada B, dan C tidak berhutang lagi kepada A, tetapi hutangnya kepada A telah berpindah kepada B; berarti C harus membayar hutangnya itu kepada B, tidak lagi kepada A.⁴⁶

2. Syarat *Hawalah*

Hawalah dianggap sah apabila memenuhi persyaratan-persyaratan yang adakalanya berkaitan dengan *muhil*, ada juga dengan *muhal*, *muhal alaihi*, *shighat*, maupun hutang itu sendiri.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 363-365 adalah sebagai berikut:

- a. Para pihak yang melakukan akad *hawalah*/pemindahan hutang harus memiliki kecakapan hukum.
- b. Peminjam harus memberitahukan kepada pemberi pinjaman bahwa ia akan memindahkan hutangnya kepada pihak lain.

⁴⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014, h. 312.

- c. Persetujuan memberi pinjaman mengenai rencana peminjam untuk memindahkan hutang adalah syarat diperbolehkannya akad *hawalah*/pemindahan hutang.
- d. Akad *hawalah*/pemindahan hutang dapat dilakukan jika pihak penerima *hawalah*/pemindahan hutang menyetujui keinginan peminjam.
- e. *Hawalah*/pemindahan hutang tidak disyaratkan adanya hutang dari penerima *hawalah*/pemindahan hutang kepada pemindah hutang.
- f. *Hawalah*/pemindahan hutang tidak disyaratkan adanya sesuatu yang diterima oleh pemindah hutang dari pihak yang menerima *hawalah*/pemindahan hutang sebagai hadiah atau imbalan.⁴⁷

Sedangkan menurut semua Imam Mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali) berpendapat, bahwa *hawalah* menjadi sah, apabila sudah terpenuhi syarat-syarat yang berkaitan dengan pihak pertama, kedua dan ketiga serta yang berkaitan dengan hutang itu.

⁴⁷ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Bab XIII *Hawalah*, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, 2009, h. 102-103.

- a. Syarat bagi pihak pertama (*muhil*) ialah:
 - 1) Cakap dalam melakukan hukum, dalam bentuk akad, yaitu balig dan berakal.⁴⁸ Maka, tidak sah *hawalah* nya orang gila atau anak kecil.⁴⁹
 - 2) Ada persetujuan (*ridha*). Jika pihak pertama dipaksa untuk melakukan *hawalah*, maka akad tersebut tidak sah.
- b. Syarat kepada pihak kedua (*muhal*) ialah:
 - 1) Cakap dalam melakukan hukum, dalam bentuk akad, yaitu balig dan berakal.
 - 2) Disyaratkan ada persetujuan dari pihak kedua terhadap pihak pertama yang melakukan *hawalah* (Madzhab Hanafi, sebagian besar Madzhab Maliki dan Syafi'i).
- c. Syarat bagi pihak ketiga (*muhal 'alaih*) ialah:
 - 1) Cakap melakukan tindakan hukum dalam bentuk akad, sebagai syarat bagi pihak pertama dan kedua.
 - 2) Disyaratkan ada pernyataan persetujuan dari pihak ketiga (Madzhab Hanafi) sedangkan Madzhab lainnya (Maliki, Syafi'I dan Hanbali) tidak mensyaratkan hal ini. Sebab dalam akad *hawalah* pihak ketiga

⁴⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2003, h. 223.

⁴⁹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012, h. 181.

dipandang sebagai obyek akad. Dengan demikian persetujuan tidak merupakan syarat sah *hawalah*.

- 3) Imam Abu Hanifah dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani menambahkan, bahwa kabul tersebut, dilakukan dengan sempurna oleh pihak ketiga didalam suatu masjid akad.
- d. Syarat yang diperlukan terhadap hutang yang dialihkan (*muhal bihi*), ialah:
- 1) Sesuatu yang dialihkan itu adalah sesuatu yang sudah dalam bentuk hutang piutang yang sudah pasti.
 - 2) Apabila pengalihan hutang itu dalam bentuk *hawalah al-muqayyadah* semua ulama fikih sepakat menyatakan, bahwa baik hutang pertama kepada pihak kedua maupun hutang pihak ketiga kepada pihak pertama mesti sama jumlah dan kualitasnya. Jika antara kedua hutang tersebut terdapat perbedaan jumlah (hutang dalam bentuk uang), atau perbedaan kualitasnya (hutang dalam bentuk barang), maka *hiwalah* tidak sah. Tetapi apabila pengalihan itu dalam bentuk *hawalah al-muthlaqah* (Madzhab Hanafi), maka kedua hutang tersebut tidak mesti sama, baik jumlah maupun kualitasnya.

- 3) Madzhab Syafi’I menambahkan, bahwa kedua hutang tersebut mesti sama pula, waktu jatuh temponya. Jika tidak sama, maka tidak sah.⁵⁰

D. Akibat Hukum Akad *Hawalah*

Hawalah memiliki beberapa konsekuensi hukum seperti berikut,

1. Pihak *muhil* terbebas dari tanggungan hutang yang ada (*muhal bihi*).⁵¹

Apabila akad *hawalah* berjalan sah, dengan sendirinya tanggung jawab *muhil* menjadi gugur. Andai kata *muhal’alaihi* mengalami kebangkrutan atau membantah adanya *hawalah* atau meninggal dunia maka pihak *muhal* tidak boleh kembali lagi berurusan dengan pihak *muhil* karena memang hutangnya telah di *hawalahkan*. Demikianlah pendapat jumhur ulama.⁵²

2. Ditetapkan hak untuk menagih hutang bagi *muhal* (orang yang hutangnya dipindahkan) kepada *muhal ‘alaihi*.⁵³ Karena *hawalah* menghendaki adanya pemindahan kedalam tanggung jawab pihak *muhal ‘alaihi*, yaitu pemindahan hutang dan penagihan.⁵⁴

⁵⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2003, h. 223-224.

⁵¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Darulfikir, 2011, h. 98.

⁵² Abdul Rahman Ghazaly, et al. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, h. 257.

⁵³ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012, h. 182.

⁵⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Darulfikir, 2011, h. 100.

3. Ditetapkan kewajiban atas *muhal* 'alaihi untuk menanggung *muhil*, artinya setiap *muhal* mewajibkan kepadanya hal yang berhubungan dengan hutang yang di *hawalahkan*, sehingga ia wajib menurutinya.

Pendapat lain dikemukakan oleh al-Jazairi (2003:527) sebagai berikut.

1. *Muhal* 'alaihi (objek pengalihan hutang) harus mampu menepati janjinya,⁵⁵ karena Rasulullah SAW. bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ دَكْوَانَ عَنْ الْأَعْرَجِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُ
الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَمَنْ أَتْبَعَ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ibnu Dzakwan dari Al A’raj dari Abu Hurairah RA dari Nabi SAW bersabda: “Menunda membayar hutang bagi orang kaya adalah kezhaliman dan apabila seorang dari kalian hutangnya dialihkan kepada orang kaya, hendaklah ia ikuti.”⁵⁶

2. Jika pelunasan hutang dialihkan kepada seseorang dan ternyata ia terbukti bangkrut, atau meninggal dunia, atau tidak ada di rumah dalam jangka waktu yang lama maka kewajiban

⁵⁵ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012, h. 182.

⁵⁶ Az-zuhaili, *Fiqh* ..., h. 85

pelunasan hutang kembali kepada *muhil* (pengalih pelunasan hutang).⁵⁷

E. Berakhirnya Akad *Hawalah*

Hawalah berakhir dan dianggap selesai dengan beberapa hal, yaitu:

1. Akad *hawalah* akan berakhir ketika terjadi pembatalan atau dianulir (*fasakh*), dan *muhal* memiliki hak untuk melakukan penagihan kembali kepada *muhil*. Menurut Hanabilah, Syafi'iyah dan Malikiyah, ketika akad *hawalah* telah dilakukan secara sempurna, hak penagihan dan beban hutang tidak bisa dialihkan kembali kepada *muhil*.⁵⁸ *Fasakh* menurut istilah para ulama fikih adalah penghentian akad sebelum sampai kepada tujuan yang sebenarnya diinginkan⁵⁹ atau berakhirnya suatu akad sebelum selesai.⁶⁰
2. Pihak *muhal* '*alaihi* melunasi hutang yang dialihkan kepada pihak *muhal*.⁶¹
3. Pihak *muhal* menghibahkan atau menyedekahkan harta yang merupakan hutang dalam akad *hawalah* itu kepada *muhal* '*alaihi*.⁶²

⁵⁷ Nawawi, *Fikih ...*, h. 182.

⁵⁸ Dimayauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h.260-261.

⁵⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Darulfikir, 2011, h. 100.

⁶⁰ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012, h. 183.

⁶¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2003, h. 225.

4. Pihak *muhal* membebasakan *muhal* ‘*alaihi* dari tanggungan membayar hutang.⁶³
5. Jika terjadi *at-Tawa*⁶⁴ yang menimpa hak *muhal* dengan meninggalkan pihak *muhal* ‘*alaihi* atau mengalami kebangkrutan dan *muhal* tidak diberitahu oleh *muhil*, maka ia tetap berhak melakukan penagihan terhadap *muhil*.⁶⁵ Hal ini pendapat madzhab Hanafiyyah yang berdasarkan apa yang diriwayatkan dari Utsman Ibnu ‘Affan r.a., bahwasanya ia berkata sesuatu yang menyangkut perihal *muhal* ‘*alaihi*, “apabila ia (pihak *muhal* ‘*alaihi*) meninggal dunia dengan tanpa meninggalkan apa-apa, maka hutang yang ada (*muhal bihi*) kembali menjadi tanggungan pihak *muhil*”. Disamping itu, karena *hawalah* berlaku (dikaitkan) dengan keselamatan *muhal* ‘*alaihi*, untuk melunasi hutang maka hal ini seperti sifat terbebasnya barang dagangan dari aib dan cacat.⁶⁶

Dari sekian pendapat yang telah dikemukakan di atas, perlu dicermati persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan

⁶² Abdul Rahman Ghazaly, et al. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, h. 258.

⁶³ Nawawi, *Fikih ...*, h. 183.

⁶⁴ *At-Tawaa* menurut bahasa artinya adalah *al-Halaak wat talaf* (binasa, rusak) fi’ilnya mengikuti wazan kata ‘*alima*, yaitu *tawiya yatwaa*. Sedangkan menurut istilah seperti yang akan kami jelaskan dari madzhab Hanafiyyah adalah tidak dimungkinkannya bagi pihak *muhal* mendapatkan haknya dikarenakan adanya suatu hal yang tidak ada campur tangan sama sekali dari pihak *muhal* di dalamnya, sseperti pihak *muhal* ‘*alaihi* mengalami kepailitan umpamanya.

⁶⁵ Djuwaini, *Pengantar...*, h.260-261.

⁶⁶ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012, h. 183.

apakah sudah memenuhi atau belum, dan apakah akad *hawalah* itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan disepakati.

Persyaratan-persyaratan yang telah disepakati bersama harus dipatuhi oleh semua pihak, sebagaimana sabda Rasulullah:

المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ (رواه الترميذى والحاكم)

“Umat Islam terikat dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan (bersama)”. (HR. Tirmidzi dan al-Hakim)⁶⁷

Sekiranya ada pihak yang dirugikan dalam pelaksanaan akad *hawalah* itu, maka ia dapat mengadakan gugatan, apabila orang yang dilimpahi tanggung jawab (*muhal* ‘*alaih*) mengingkari kewajibannya dan apabila terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.⁶⁸ Dengan bukti-bukti yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan sebagaimana sabda Rasulullah:

الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعَى وَلَيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ (رواه البخارى والترميدى وابن ماجه)

⁶⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2003, h. 226.

⁶⁸ Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 12/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Hawalah*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014, h. 110.

“Penggugat wajib mengajukan alat bukti, sedangkan tergugat menyatakan sumpah”. (HR. Bukhari, Tirmidzi dan Ibnu Majah)

Selanjutnya hakim dapat menetapkan suatu keputusan setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dan setelah mendengar sumpah yang diucapkan tergugat.⁶⁹

F. Relevansi *Hawalah* dengan *Qardh*

Hawalah merupakan salah satu entitas budaya muslim pada masa awal Islam yang dimaksudkan untuk memenuhi janji dalam melunasi hutang karena secara tersirat dalam hutang piutang terkandung sebuah janji untuk membayar hutang⁷⁰ Hal ini sesuai dengan surat al-Israa ayat 34 sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا
بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ۝ ٣٤

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya”.⁷¹

Dengan demikian, adanya unsur memenuhi janji dalam bentuk pembayaran hutang menjadikan *Hawalah* memiliki dua fungsi yang bersifat simultan dalam pelaksanaannya. Pertama, untuk menjamin terpenuhinya pertanggungjawaban pada Allah SWT.

⁶⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2003, h. 226.

⁷⁰ Suprihatin, *Al-Hawalah dan Relevansinya dengan Perekonomian Islam Modern*, Maslahah, vol.2, no. 1, Maret 2011

⁷¹ Perpustakaan Nasional RI, *Al-Quran dan Tafsirnya*, Jakarta: Widya Cahaya, 2015, h. 471.

Kedua, memudahkan dan melindungi hak para pihak yang melakukan hutang piutang.⁷²

Dibolehkannya *hawalah* (pengalihan hutang) merujuk pada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ دَكْوَانَ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَمَنْ أَتْبَعَ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ibnu Dzakwan dari Al A’raj dari Abu Hurairah RA dari Nabi SAW bersabda: “Menunda membayar hutang bagi orang kaya adalah kezhaliman dan apabila seorang dari kalian hutangnya dialihkan kepada orang kaya, hendaklah ia ikuti.”⁷³

Merujuk pada hadis tentang dibolehkannya pengalihan pembayaran hutang sebagaimana disebutkan diatas, maka menghidupkan *hawalah* tidak bertentangan dengan ketentuan Islam. Bahkan hal ini dapat dijadikan sebagai bentuk kemudahan (*rukhsah*) bagi orang yang memiliki hutang dan dalam keadaan kesulitan dalam membayar kewajibannya, tetapi masih memiliki asset pada pihak lain. Maka untuk memastikan kewajibannya dalam membayar hutangnya pada pihak lain dapat melakukan *hawalah*.

⁷² Suprihatin, *Al-Hawalah dan Relevansinya dengan Perekonomian Islam Modern*, Maslahah, vol.2, no. 1, Maret 2011

⁷³ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Darulfikir, 2011, h. 85

Adapun ketentuan hutang piutang (*qardh*) dipandang sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. *Muqarrid* itu layak untuk melakukan *tabarru'*, karena hutang piutang (*qardh*) itu pemilikan harta yang merupakan bagian dari akad *tabarru'* tanpa ada penggantian.
2. Harta *muqtarid* berasal dari harta *mitsli*, yaitu harta yang dapat ditakar, ditimbang, diukur atau dihitung satuan.
3. Ada serah terima barang, karena hutang piutang (*qardh*) merupakan bagian dari *tabarru'* sementara *tabarru'* hanya sempurna dengan adanya serah terima barang (*qardh*).
4. Hutang piutang (*qardh*) itu memberikan manfaat kepada *muqtarid*, sehingga tidak diperbolehkan dalam hutang piutang (*qardh*) itu *muqarrid* mensyaratkan adanya tambahan (*ziyadah*) kepada *muqtarid* pada saat pengembalian.⁷⁴

Larangan adanya tambahan pada saat pengembalian hutang termasuk dalam ragam riba *qardh* yakni riba yang terjadi pada transaksi hutang piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama risiko (*al-ghunmu bil ghunmi*) dan hasil usaha muncul bersama biaya (*al-kharraj bidh dhaman*). Transaksi semisal ini mengandung pertukaran

⁷⁴ Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015, h.146

kewajiban menanggung beban, hanya karena berjalannya waktu.⁷⁵

Oleh karena itu, seluruh ulama telah sepakat bahwa riba hutang piutang (*qardh*) itu diharamkan dalam Islam. Hal ini berdasarkan surat QS. Al-Baqarah [2]: 278

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ



“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah swt, dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman”.⁷⁶

Perintah meninggalkan riba dihubungkan dengan perintah bertakwa. Dengan hubungan itu. Jika kamu tidak menghentikannya berarti kamu telah berdusta kepada Allah SWT dalam pengakuan imanmu. Mustahil orang-orang yang mengaku beriman dan bertakwa melakukan riba, karena perbuatan itu tidak mungkin ada pada diri seseorang pada saat waktu yang sama. Yang mungkin terjadi ialah seseorang menjadi pemakan riba, atau seseorang beriman dan bertakwa tanpa memakan riba.⁷⁷

⁷⁵ Adiwarman. A. Karim & Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2015, h. 5.

⁷⁶ Perpustakaan Nasional RI, *Al-Quran dan Tafsirnya*, Jakarta: Widya Cahaya, 2015, h. 420.

⁷⁷ *Ibid.* h. 427.

BAB III

PELAKSANAAN TRANSAKSI OVER KREDIT MOBIL DI KECAMATAN SUKAHAJI KABUPATEN MAJALENGKA

A. PROFIL KECAMATAN SUKAHAJI KABUPATEN MAJALENGKA

1. Visi dan Misi

Visi

“Terwujudnya pelayanan prima menuju masyarakat sejahtera yang mandiri berdaya saing partisipatif dan produktif”.

Visi Kecamatan Sukahaji ini dimaksudkan untuk mewujudkan visi Kabupaten Majalengka “MAKMUR” (Maju, Aman, Kondusif, Mandiri, Unggul, Religius). Penetapan visi Kecamatan Sukahaji di atas yaitu :

Pelayanan Prima : Pelayanan yang dilakukan oleh aparat pemerintah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan cepat, mudah terjangkau, terukur dan berkualitas sebagai jaminan dan kepastian penyelenggaraan pelayanan.

Masyarakat Sejahtera : Terciptanya tatanan kehidupan masyarakat yang aman sentosa dan makmur, selamat terlepas dari segala kesukaran serta selamat tak kurang dari satu apapun.

- Masyarakat mandiri : Terciptanya tatanan kehidupan masyarakat yang mandiri tidak tergantung dan menunggu bantuan orang lain berinisiatif, mampu berinovasi dan mampu membiayai diri sendiri.
- Berdaya saing : Mampu memperkenalkan dan mempromosikan produk-produk unggulan untuk peningkatan dan pengembangan perekonomian masyarakat. Berdasarkan potensi yang ada memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif, dibanding dengan daerah lain dalam konteks pembangunan Kecamatan Sukahaji
- Partisipatif : Terciptanya tatanan kehidupan masyarakat yang mampu secara aktif ikut berpartisipasi dalam mengambil keputusan bersama pemerintah.
- Produktif : Terciptanya tatanan kehidupan masyarakat yang memiliki pola perilaku cenderung lebih banyak berkarya suatu aktivitas kehidupan masyarakat yang dijiwai oleh nilai-nilai hasilkan sesuatu barang yang bernilai lebih.

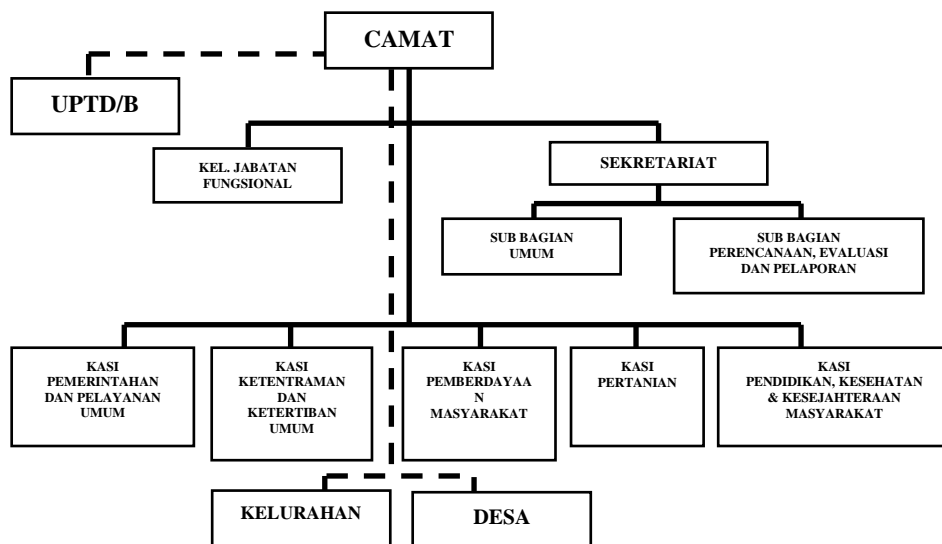
Misi

Untuk mencapai visi tersebut, maka Kecamatan Sukahaji mengusung misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi dengan dinas terkait dalam rangka peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, perekonomian dan pembangunan infrastruktur perdesaan.
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dengan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan aparatur.
3. Meningkatkan koordinasi dan partisipasi masyarakat dalam rangka mewujudkan keamanan, ketertiban dan kenyamanan lingkungan dengan berpedoman pada aturan dan nilai-nilai budaya.
4. Fasilitasi peningkatan sumber daya aparatur pemerintahan desa dalam menunjang perwujudan desa mandiri.
5. Fasilitasi dan koordinasi perencanaan pembangunan dalam mewujudkan sinergitas pelaksanaan pembangunan.
6. Fasilitasi dan koordinasi pembinaan aktivitas kehidupan masyarakat yang dijiwai oleh nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Sumber Daya Aparatur Kecamatan

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN SUKAHAJI



Keterangan :

NO	NAMA	JABATAN
1.	Drs. Oman Suratman, M.Si.	Camat
2.	Usnadi, S.Sos.,..	Sekcam
3.	Casmini, S.Sos	Kasi Pemerintahan dan Yan. Um.
4.	Yosef Rizal, Ba.	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5.	Abdul Sukur, S.Sos.	Kasi Pertanian
6.	Iis Neni Suhaeni, S.Ap.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
7.	Winata	Kasi Pendidikan dan Kesmas.
8.	Arief Rachman Hakim, S.Ip.	Kasubbag Umum
9.	Isong Soegandi, S.Sos.	Kasubbag PEP

**Data Pegawai Kecamatan Sukahaji Berdasarkan Tingkat
Kepangkatan**

No	Nama Pegawai	Jabatan	NIP	Pangkat/ Gol.
1	2	3	4	5
1.	Drs. Oman Suratman, M.Si.	Camat Sukahaji	1963062419 89031005	Pembina Tk. I, IV/b
2.	Usnadi, S.Sos.	Sekretaris	1962022019 91031006	Pembina, IV/a
3.	Abdul Sukur, S.Sos.	Kepala Seksi Pertanian	1961072219 84031004	Penata Tk.I, III/d
4.	Yosef Rizal, Ba.	Kepala Seksi Ketenteraman dan Keteriban Umum	1967082919 88031004	Penata Tk.I, III/d
5.	Winata	Kepala Seksi Pendidikan dan Kesejahteraan Masyarakat	1960091119 83101001	Penata Tk.I, III/d
6.	Isong Soegandi, S.Sos.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1963010519 93111001	Penata Tk.I, III/d
7.	Casmini, S.Sos	Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum	1965072719 90122001	Penata, III/c
8.	Arief Rachman Hakim, S.Ip.	Kepala Sub Bagian Umum	1974010819 99031002	Penata, III/c
9.	Sudarjat	Sekretaris Desa Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum	1960121119 83031018	Penata Muda Tk. I, III/b
10.	Iis Neni Suhaeni, S.Ap.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	1967102619 94032005	Penata Muda Tk. I, III/b

1	2	3	4	5
11.	Sri Nyoto Cipto Hening	Bendaharawan Pengeluaran Sub Bagian Umum pada Sekretariat Kecamatan Sukahaji	1963060519 90031014	Pengatur Tk. I, II/d
12.	Tuty Winarti	Koordinator Urusan Pelayanan Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum	1965081419 86112001	Pengatur II/c
13.	Ade Surahim	Pengadministrasi Pemerintahan Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum	1961012120 07011006	Pengatur II/c
14.	Euis Jubaedah	Sekretaris Desa Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum	1968121320 07012016	Pengatur, II/c
15.	Dodo Wachyulhuda	Sekretaris Desa Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum	1965070120 07011021	Pengatur, II/c
16.	Andi Purbadi	Sekretaris Desa Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum	1963010420 07011009	Pengatur, II/c
17.	Siti Rokayah	Pengolah Data Program Pemerintah, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Seksi	1977120520 09012003	Pengatur Muda Tk. I, II/b

1	2	3	4	5
		Pemberdayaan Masyarakat		
18.	Efa Fakhrudin Yuliana	Pengolah Data Masalah dan Potensi Kesejahteraan Sosial Seksi Pendidikan dan Kesejahteraan Masyarakat	1976072420 10011007	Pengatur Muda Tk. I, II/b
19.	Duljaya	Pengelola Barang Sub Bagian Umum pada Sekretariat Kecamatan Sukahaji	1968032420 15081001	Pengatur Muda, II/a
20.	Otong Wahyudin	Pengadministrasi Umum Sub Bagian Umum pada Sekretariat Kecamatan Sukahaji	1966061520 12121001	Juru Muda, II/a

3. Letak Geografis

Luas Wilayah Kecamatan Sukahaji adalah 32,52 Km² yang berarti Kecamatan Sukahaji hanya sekitar 3,6 % dari luas wilayah Kabupaten Majalengka dan secara geografis Kecamatan Sukahaji terletak di bagian selatan Ibu Kota Kabupaten Majalengka yaitu antara 118°15' - 118°12' Bujur Timur dan 6°56' - 6°56' Lintang Selatan dengan ketinggian tempat dari permukaan laut berkisar antara 147 – 83 (mdpl), dengan batas-batas wilayahnya :

- Sebelah Utara : Kecamatan Jatiwangi dan Palasah
- Sebelah Timur : Kecamatan Sindang.
- Sebelah Barat : Kecamatan Cigasong
- Sebelah Selatan : Kecamatan Maja.

Jarak dari Ibu Kota Kecamatan ke Ibu Kota Kabupaten 5 - 10 km dan Jarak ke Ibu Kota Provinsi Jawa Barat (Bandung) yaitu 100 - 105 km. Curah hujan rata-rata setahun sekitar 226,778 mm dengan curah hujan tertinggi terjadi pada Bulan Januari yang mencapai 462 mm dengan hari hujan rata-rata 12 hari.

4. Letak Demografis

Jumlah penduduk kecamatan Sukahaji pada Tahun 2015 adalah 67.596 orang yang terdiri dari 34.445 orang penduduk laki-laki dan 33.151 orang penduduk perempuan. Dengan jumlah Rumah Tangga sebanyak 19.505 dan rata-rata kepadatan penduduk sebesar 1.553 jiwa/km², dimana kepadatan tertinggi berada di Desa Padahanten dengan kepadatan 3.168 jiwa/km², dan kepadatan terendah di Desa Candrajaya dengan kepadatan 495 jiwa/km². Adapun Perincian data kependudukan yang lebih lengkap lagi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1. Data Administrasi Pemerintahan Tingkat Desa di Kecamatan Sukahaji Tahun 2015

No .	Nama Desa	Data Administrasi Pemerintahan Tingkat Desa		
		Jumlah Dusun	Jumlah RW	Jumlah RT
1	Candrajaya	5	4	13
2	Ciomas	6	6	18
3	Sukahaji	7	7	14
4	Padahanten	3	7	14
5	Cikalong	3	8	19
6	Babakan Manjeti	3	6	20
7	Cikoneng	5	5	9
8	Palabuan	4	-	29
9	Cikeusik	3	3	10
10	Salagedang	7	5	15
11	Tanjung Sari	2	6	9
12	Nanggewer	2	7	14
13	Jayi	5	5	10
Jumlah		50	69	194

Tabel 2. Data Luas Daerah, Rumah Tangga, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Tingkat Desa di Kecamatan Sukahaji Tahun 2015

No.	Nama Desa	Luas Daerah (Km ²)	Rumah Tangga	Jumlah Penduduk			Kepadatan Penduduk per Km ²
				Laki-Laki	Perempuan	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Candrajaya	1,048	818	1268	1215	2483	2369,20
2	Ciomas	1.310	734	1068	1114	2182	1665,65
3	Sukahaji	1.989	1167	1855	1836	3693	1856,71
4	Padahanten	3,055	1046	1615	1600	3215	1052,37

5	Cikalong	2,988	1455	2484	2427	4911	1643,57
6	Babakan Manjeti	2,305	1376	2031	2115	4146	1798,70
7	Cikoneng	1,761	735	1192	1209	2401	1363,43
8	Palabuan	2,878	1718	2597	2619	5216	1812,37
9	Cikeusik	3,356	936	1305	1413	2718	809,89
10	Salagedang	4,197	1323	2124	2155	4279	1019,54
11	Tanjungsari	1,434	1459	2435	1509	3944	2750,35
12	Nanggewer	1,698	616	1011	1008	2019	1189,05
13	Jayi	1,576	2788	1518	1502	3020	1916,24
Jumlah		29,586	16171	22503	21724	44227	21247,07

Tabel 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama yang Dianut di Kecamatan Sukahaji Tahun 2015

No	Nama Desa	Agama					Jumlah
		Islam	Katolik	Protestan	Hindu	Budha	
1	Candrajaya	2483	-	-	-	-	2483
2	Ciomas	2182	-	-	-	-	2182
3	Sukahaji	3693	-	-	-	-	3693
4	Padahanten	3215	-	-	-	-	3215
5	Cikalong	4911	-	-	-	-	4911
6	Babakan Manjeti	4146	-	-	-	-	4146
7	Cikoneng	2401	-	-	-	-	2401
8	Palabuan	5216	-	-	-	-	5216
9	Cikeusik	2718	-	-	-	-	2718
10	Salagedang	4279	-	-	-	-	4279
11	Tanjungsari	3944	-	-	-	-	3944
12	Nanggewer	2019	-	-	-	-	2019
13	Jayi	3020	-	-	-	-	3020
Jumlah		44227	-	-	-	-	44227

Pemeluk agama Islam Menjadi mayoritas, Masyarakat berbondong-bondong berpartisipasi dalam kegiatan rutin keagamaan

dengan penuh keyakinan untuk menumbuhkan jiwa religius dan rasa tolong menolong dalam hal kebaikan kepada sesama.

5. Sarana Pelayanan Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan meliputi seluruh siklus atau tahapan kehidupan manusia. Bila pembangunan kesehatan berhasil dengan baik maka secara langsung atau tidak langsung akan terjadi peningkatan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan merupakan bagian yang sangat penting dalam rangka peningkatan SDM penduduk Kecamatan Sukahaji, karena itu program-program kesehatan telah dimulai atau diprioritaskan pada calon generasi penerus. Dengan adanya upaya tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang baik, yang akhirnya akan meningkatkan produktivitas. Dan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat antara lain dilakukan dengan penambahan tenaga para medis. Untuk mengetahui data pencapaian dalam Bidang Kesehatan, disajikan data Sarana Pelayanan Kesehatan pada tabel di bawah ini :

Tabel 4. Data Jumlah Tempat Pelayanan Kesehatan Dirinci Per Desa di Kecamatan Sukahaji Tahun 2015

No	Nama Desa	Rumah Sakit	Puskesmas	Pustu	Posyandu	Pos KB	Balai Pengobatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Candrajaya	-	-	-	3	1	-
2	Ciomas	-	-	1	4	1	-
3	Sukahaji	-	-	-	6	1	-
4	Padahanten	-	-	-	7	1	-
5	Cikalong	-	-	-	3	1	-
6	Babakan Manjeti	-	1	-	4	1	1

7	Cikoneng	-	-	-	6	1	-
8	Palabuan	-	-	-	4	1	-
9	Cikeusik	-	-	-	6	1	-
10	Salagedang	-	-	-	2	1	-
11	Tanjungsari	-	-	-	4	1	-
12	Nanggawer	-	-	-	5	1	-
13	Jayi	-	-	-	2	1	1
Jumlah		0	1	2	62	15	2

Tabel 5. Target dan Realisasi Peserta KB dirinci Per Desa di Kecamatan Sukahaji Tahun 2015

No.	Nama Desa	Target	Realisasi	Pencapaian (%)
1	Candrayaya	27	53	50,94
2	Ciomas	261	179	68,58
3	Sukahaji	276	293	106,16
4	Padahanten	269	237	88,10
5	Cikalong	195	130	66,67
6	Babakan Manjeti	166	152	91,56
7	Cikoneng	152	213	140,13
8	Palabuan	249	215	86,34
9	Cikeusik	192	165	85,94
10	Salagedang	43	71	165,12
11	Tanjungsari	122	106	86,88
12	Nanggawer	152	192	126,31
13	Jayi	45	35	77,78
Jumlah		2.281	2.164	95,29

Tabel 6. Data Rekapitulasi Peserta Keluarga Berencana Aktif dirinci Per Desa di Kecamatan Sukahaji Tahun 2015

No.	Nama Desa	Total Peserta KB Aktif (PA)			% PA/PUS
		Hormonal	Non Hormonal	Total	
1	Candrayaya	344	70	414	83,29
2	Ciomas	256	36	292	70,19
3	Sukahaji	443	67	510	76,46

4	Padahanten	484	35	519	85,22
5	Cikalong	574	123	697	75,68
6	Babakan Manjeti	612	84	696	82,56
7	Cikoneng	398	80	548	84,06
8	Palabuan	687	83	770	81,65
9	Cikeusik	428	53	481	84,53
10	Salagedang	619	70	689	87,32
11	Tanjungsari	632	98	730	85,78
12	Nanggewer	349	31	380	93,83
13	Jayi	526	22	548	86,57
Jumlah		6280	793	7073	82,81

Tabel 7. Data Peserta Keluarga Berencana Aktif Menurut Jenis Alat Kontrasepsi Per Desa di Kecamatan Sukahaji Tahun 2015

No.	Nama Desa	Jenis Alat Kontrasepsi							
		PUS	Implan	Suntik	Pil	IUD	MOW	MOP	Kondom
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Candrajaya	497	21	256	67	38	23	8	1
2	Ciomas	416	10	205	41	16	16	4	3
3	Sukahaji	667	16	330	97	30	22	10	5
4	Padahanten	609	22	400	62	16	19	-	-
5	Cikalong	921	20	407	147	72	40	11	11
6	Babakan Manjeti	843	13	513	86	36	41	7	3
7	Cikoneng	414	2	287	49	7	3	10	-
8	Palabuan	943	12	556	119	34	37	4	2
9	Cikeusik	569	32	332	64	16	27	7	6
10	Salagedang	789	46	498	75	47	15	28	1
11	Tanjungsari	851	22	505	105	30	38	4	2
12	Nanggewer	405	2	294	53	12	15	-	-
13	Jayi	633	9	421	96	15	7	-	-
Jumlah		8541	215	5004	1061	369	303	93	28

6. Sosial Ekonomi

a. Pertanian

Kecamatan Sukahaji merupakan salah satu sentra pertanian di Kabupaten Majalengka. Penggunaan lahan untuk pertanian dibedakan menjadi lahan sawah dan lahan kering. Pada tahun 2015 luas lahan sawah 1.711 ha dan lahan kering seluas 2.199,78 ha. Data Potensi Pertanian Kecamatan Sukahaji sebagai berikut :

Tabel 8. Data keadaan potensi lahan usaha tani sawah Per Desa di Kecamatan Sukahaji Tahun 2015

No	Desa	Pengairan teknis (Ha)	Setengah teknis (Ha)	Sederhana (Ha)	Pedesaan (Ha)	Tadah Hujan (Ha)	Jumlah (Ha)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Candrajaya	0	103	0	0	0	103
2	Ciomas	0	85	0	0	0	85
3	Padahanten	69,36	29,95	0	0	35,88	135,19
4	Cikalong	0	92	0	0	0	92
5	Sukahaji	0	115	0	0	0	115
6	Cikoneng	0	64,5	0	0	22,5	87
7	Babakan Manjeti	0	83,07	0	0	55,31	83,07
8	Palbuan	0	213	0	0	0	213
9	Cikeusik	0	48,2	0	8,55	25,56	82,31
10	Salagedang	12,5	170	0	62,5	62,5	250
11	Tanjungsari	8	75,2	0	0	0	83,2
12	Jayi	0	90	0	10,5	0	100,5
13	Nanggawer	0	102,52	0	20,48	0	123
Jumlah				0			1552,27

Tabel 9. Data keadaan potensi lahan usaha tani lahan kering Per Desa di Kecamatan Sukahaji Tahun 2015

No	DESA	Pemuki man	Tegal (Ha)	kolam (Ha)	Kebun rakyat (Ha)	Lain- lain (Ha)	Jumlah (Ha)
1	Candrajaya	18,9	0	2,05	0	3,12	24,07
2	Ciomas	47,7	0	1,2	21,7	2,35	70,6
3	Padahanten	39	0	1,1	139,49	23,37	203,31
4	Cikalong	83,49	0	3,05	178,45	48,07	313,06
5	Sukahaji	19,37	0	2,35	7,19	21,42	50,33
6	Cikoneng	15	0	1,05	50,55	23,95	90,55
7	Babakan Manjeti	30,03	0	3,83	43,32	16,37	93,55
8	Palbuan	19,36	0	0,25	46,27	7,92	54,44
9	Cikeusik	15	0	1,05	241,13	0,7	257,88
10	Salagedang	86	48	1,35	57,5	18,67	211,52
11	Tanjungsari	54,15	0	0,6	42,98	26,15	123,88
12	Jayi	34,5	0	1,3	32,05	2	69,85
13	Nanggewer	27,78	0	1,1	50	0,5	79,38
	Jumlah						1642,42

Tabel 10. Keadaan Penduduk berdasarkan Status tani

No	DESA	Pemilik	Pemilik penggarap	Pengga rap	Penye wa	Buruh tani	Jumlah
1	Candrajaya	96	144	279	394	205	1118
2	Ciomas	145	130	57	18	87	537
3	Padahanten	797	207	329	124	636	2093
4	Cikalong	27	69	275	78	236	685
5	Sukahaji	33	42	117	78	933	1203
6	Cikoneng	45	30	40	80	290	485
7	Babakan Manjeti	776	726	64	15	30	1611
8	Palbuan	35	56	27	47	82	247
9	Cikeusik	480	350	90	10	350	1280
10	Salagedang	620	32	25	51	20	784
11	Tanjungsari	223	63	45	41	481	853
12	Jayi	120	133	68	43	136	500
13	Nanggewer	223	63	45	34	121	486
	Jumlah	3620	2045	1461	1013	3607	11882

Tabel 11. Data Luas Panen dan Produksi Padi dirinci Per Desa Tahun 2015

No.	Nama Desa	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Rata-Rata Produksi/ha
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Candrajaya	80	627,2	7,84
2	Ciomas	67	496,34	7,4
3	Sukahaji	102	871,49	8,54
4	Padahanten	118	1302,72	11,04
5	Cikalong	70	481,6	6,88
6	Babakan Manjeti	118	1245,44	8,96
7	Cikoneng	92	765,44	8,22
8	Palabuan	200	1568	7,28
9	Cikeusik	60	463,68	7,73
10	Salagedang	225	2275,2	10,12
11	Tanjungsari	28	212,8	7,6
12	Nanggewer	66	749,36	8,8
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
13	Jayi	85	576,58	8,73
Jumlah		1311 ha	11635,4 ton	100,41 ha

Tabel 12 Data Luas Panen dan Produksi Jagung dirinci Per Desa Tahun 2015

No.	Nama Desa	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Rata-Rata Produksi/ha
1	Candrajaya	-	-	-
2	Ciomas	-	-	-
3	Sukahaji	-	-	-
4	Padahanten	-	-	-
5	Cikalong	-	-	-
6	Babakan Manjeti	-	-	-
7	Cikoneng	-	-	-

8	Palabuan	-	-	-
9	Cikeusik	-	-	-
10	Salagedang	-	-	-
11	Tanjungsari	-	-	-
12	Nanggawer	5	360	7,2
13	Jayi	5	336	6,72
Jumlah		10 ha	696 ton	13,92 ha

Tabel 13 Data Luas Panen dan Produksi Ubi Kayu dirinci Per Desa Tahun 2015

No.	Nama Desa	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Rata-Rata Produksi/ha
1	Candrajaya	-	-	-
2	Ciomas	-	-	-
3	Sukahaji	-	-	-
4	Padahanten	-	-	-
5	Cikalong	-	-	-
6	Babakan Manjeti	-	-	-
7	Cikoneng	-	-	-
8	Palabuan	-	-	-
9	Cikeusik	5	81	16,2
10	Salagedang	-	-	-
11	Tanjungsari	-	-	-
12	Nanggawer	125	2.313	18,5
13	Jayi	50	900	18,0
Jumlah		180 ha	3.294 ton	52,7 ha

b. Keadaan Ekonomi

Kecamatan Sukahaji merupakan salah satu pusat kegiatan ekonomi di Kabupaten Majalengka terutama dalam sektor perdagangan dan industri. Hal ini didukung oleh letaknya yang sangat

strategis berada di segi tiga emas sebagai pintu gerbang perbatasan yang dapat dilalui untuk melintasi 3 kabupaten/kota yaitu Kuningan-Ciamis-Tasikmalaya. Ruas jalan merupakan salah satu faktor penting dalam menggerakkan laju pertumbuhan ekonomi. Panjang jalan yang ada di Kecamatan Sukahaji mencapai $\pm 664,54$ km dan sebagian besar beraspal yaitu sepanjang ± 450 km. Laju Pertumbuhan Ekonomi tidak terlepas dari peran sinergis para *stakeholders* antara pemerintah, masyarakat dan pelaku ekonomi di Kecamatan Sukahaji dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif.

Guna mendukung pertumbuhan ekonomi rakyat, keberadaan pasar memiliki peran yang sangat strategis, di Kecamatan Sukahaji terdapat 1 pasar tradisional, mini market sebanyak 4 unit dan toko kelontong mencapai jumlah 725 unit. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan investasi dan permodalan bagi para pelaku usaha dan ekonomi bagi masyarakat terdapat lembaga keuangan sejumlah 15 unit, hal ini dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 14 Data Lembaga Keuangan Dirinci Per Desa di Kecamatan Sukahaji Tahun 2015

No.	Nama Desa	Jenis Lembaga Keuangan				
		Bank	Koperasi	KUD	BPR / LPK	Pegadaian
1	Candrajaya	-	1	-	-	-
2	Ciomas	-	-	-	-	-
3	Sukahaji	5	1	1	-	1
4	Padahanten	-	-	-	-	-
5	Cikalong	1	1	-	1	-
6	Babakan Manjeti	-	-	-	1	-
7	Cikoneng	-	-	-	-	-

8	Palabuan	-	-	-	-	-
9	Cikeusik	-	-	-	-	-
10	Salagedang	-	-	-	-	-
11	Tanjungsari	-	-	-	-	-
12	Nanggewer	-	-	-	-	-
13	Jayi	-	-	-	-	-
Jumlah		6	5	1	2	1

Sarana Akomodasi yang tersedia di Kecamatan Sukahaji diantaranya sebagai berikut :

Tabel 15. Data Jumlah Restoran, Kedai Makanan, Hotel dan Penginapan Per Desa di Kecamatan Sukahaji Tahun 2015

No.	Nama Desa	Sarana Akomodasi			
		Restoran	Kedai Makanan	Hotel	Penginapan
1	Candrajaya	-	-	-	-
2	Ciomas	-	3	-	-
3	Sukahaji	4	8	-	-
4	Padahanten	2	-	-	-
5	Cikalong	6	-	-	-
6	Babakan Manjeti	1	3	-	-
7	Cikoneng	2	-	-	-
8	Palabuan	-	1	-	-
9	Cikeusik	-	-	-	-
10	Salagedang	-	-	-	-
11	Tanjungsari	-	-	-	-
12	Nanggewer	-	-	-	-
13	Jayi	-	-	-	-
Jumlah		15	15	-	-

Tantangan dalam pembangunan salah satunya adalah upaya pengentasan kemiskinan dan menyejahterakan masyarakat. Hal ini dapat terindikasikan dari adanya Keluarga Prasejahtera di Kecamatan Sukahaji dengan jumlah dan perincian sebagai berikut :

Tabel 16 Data Pengentasan Kemiskinan Per Desa di Kecamatan Sukahaji Tahun 2015¹

No.	Nama Desa	Jumlah KK	Jumlah KK Miskin	Jumlah Penduduk Miskin	Jumlah Penerima Raskin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Candrajaya	701	184	200	200
2	Ciomas	1.436	520	1.670	416
3	Sukahaji	2.603	683	2.391	477
4	Padahanten	1.943	466	1.985	1.268
5	Cikalong	1.350	360	1.585	276
6	Babakan Manjeti	647	410	1.647	475
7	Cikoneng	1.894	639	2.056	1.939
8	Palabuan	1.622	141	531	335
9	Cikeusik	1.469	231	765	534
10	Salagedang	553	179	895	179
11	Tanjungsari	1.045	379	758	379
12	Nanggawer	1.558	354	1.062	354
13	Jayi	558	270	655	225
Jumlah		19.225	5.186	17.095	7.900

B. Praktik Over Kredit Mobil di Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka.

1. Latar Belakang Transaksi Over Kredit Mobil di Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka.

Kecamatan Sukahaji merupakan salah satu sentra pertanian dan kegiatan ekonomi dalam sektor perdagangan dan industri di Kabupaten Majalengka. Hal ini membuat banyak dari masyarakat

¹ Data monografi Kecamatan Sukahaji Bulan Februari 2016.

bergerak dalam sektor pertanian dan perdagangan. Berdasarkan data yang ditunjukkan dari keseluruhan jumlah penduduk sebanyak 67.596 orang, sebanyak 8.139 penduduknya berprofesi sebagai petani. Dengan demikian hampir 12% penduduk Kecamatan Sukahaji berprofesi sebagai petani, dan 5,33% berprofesi sebagai buruh. Adapun dengan pengaruh kegiatan ekonomi dalam sektor perdagangan, keberadaan pasar yang memiliki peran yang sangat strategis, di Kecamatan Sukahaji terdapat 1 pasar tradisional, 4 unit minimarket dan 725 unit toko kelontong. Jika ditarik garis besarnya, maka kondisi perekonomian penduduk Kecamatan Sukahaji berada dalam golongan menengah ke bawah.²

Masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup bergantung pada sektor pertanian dan perdagangan. Dimana dalam satu tahun ladang pertanian masyarakat petani bisa panen sebanyak tiga kali. Beberapa produksi sektor pertanian yang dihasilkan petani antara lain padi, jagung, ubi kayu dan ubi jalar. Adapun produksi sektor perdagangan yang dihasilkan masyarakat dalam industri besar antara lain genteng, kecap segitiga, batu bata, batu nisan, bola sepak bola. Dan dalam industri rumah tangga yang dihasilkan antara lain anyaman, batu alam, terpal dan bibit; cabe, buah mangga, dan jambu biji.

Keberadaan kendaraan sangat dibutuhkan masyarakat. Hal ini berpengaruh pada hasil produksi masyarakat yang harus

² Data monografi Kecamatan Sukahaji Bulan Februari 2016

didistribusikan di daerah tertentu. Dengan begitu masyarakat memutuskan membeli kendaraan mobil untuk mengangkut produksi yang dihasilkan dalam sektor pertanian maupun perdagangan. Dalam kondisi ketidak seimbangan antara kebutuhan ekonomi dan keinginan, masyarakat memilih jalan alternatif untuk membeli mobil secara over kredit melalui makelar untuk mengangkut hasil produksi dengan didukung harga yang tidak memberatkan masyarakat.

Adanya sistem over kredit mobil memudahkan masyarakat dalam memiliki mobil sebagai penunjang kegiatan ekonomi yang merupakan kebutuhan primer bagi masyarakat yang harus terpenuhi. Dalam memenuhi kebutuhan primer tersebut masyarakat tidak mengambil langkah untuk membeli mobil dari *dealer* atau serum yang telah tersedia di setiap daerah. Akan tetapi lebih memilih membeli melalui makelar, karena pertimbangan harga yang sesuai dengan kemampuan masyarakat dan proses yang lebih mudah. Manfaat mobil tidak hanya untuk mengangkut barang hasil produksi, mobil bisa digunakan untuk keperluan sehari-hari.

Dengan dilakukannya transaksi over kredit mobil menyebabkan tidak berpindah nama kepemilikan mobil. Hal ini tidak membuat masyarakat Kecamatan Sukahaji merasa khawatir terhadap resiko yang ditanggung dari pembelian mobil secara over kredit. Karena bagi warga, transaksi over kredit tersebut memudahkan untuk memiliki mobil dengan harga murah dan

proses cepat. Selagi kredit dibayar tepat waktu dan *amanah*, bisa meminimalisir resiko yang dapat terjadi.³

2. Praktik Over Kredit Mobil di Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka.

Over kredit mobil merupakan transaksi yang sudah lazim dilakukan masyarakat Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka. Dengan ketidakmampuan membayar keseluruhan kredit mobil, over kredit menjadi salah satu jalan alternatif untuk menyelesaikan permasalahan disaat kredit macet.

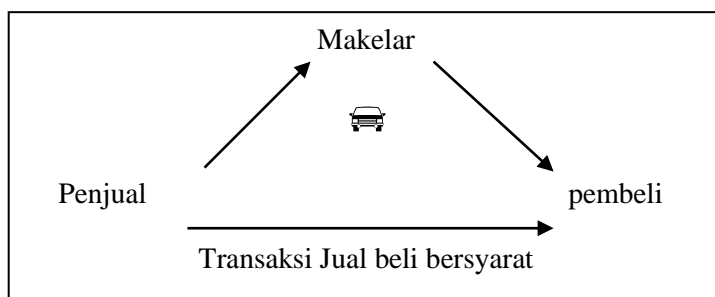
Keberadaan makelar mempunyai peran penting terlaksananya transaksi over kredit mobil, dimana orang yang berkepentingan menjual mobil kredit yang sudah tidak mampu dibayar, menjadikan suatu peluang bisnis untuk makelar. Mobil tersebut ditawarkan kepada masyarakat yang membutuhkan, dengan syarat melanjutkan pembayaran hutang mobil kredit yang dilakukan pihak penjual kepada bank dan membayar uang DP (*down of payment*) kepada pihak penjual dengan jumlah yang sama ketika penjual membayarkan DP (*down of payment*) kepada *dealer*. Di dalam praktiknya transaksi over kredit mobil dilakukan dengan lisan dan tidak tertulis dibawah materai.⁴

³ Wawancara dengan pak H. Aceng, pihak ketiga *muhal* 'alathi dalam transaksi over kredit mobil di Kecamatan Sukahaji pada 10 Juli 2017.

⁴ Wawancara dengan pak. Ade maryadi (alm) yang diwakilkan istrinya, pihak pertama *muhal* dalam transaksi over kredit mobil di Kecamatan Sukahaji pada 10 Juli 2017.

Harga jual mobil yang dibeli melalui jasa makelar cukup terjangkau. Dengan kisaran 40-60 juta dapat memenuhi keinginan masyarakat untuk memiliki mobil. Berdasarkan kisaran harga tersebut masyarakat sudah bisa memiliki mobil avanza, grand max pick up dan suzuki pick up. Hal ini yang menjadi tolak ukur perbedaan harga jual antara makelar dengan *dealer* sehingga minat masyarakat untuk memiliki mobil dengan cara over kredit melalui makelar lebih besar, meskipun tidak memiliki surat-surat lengkap.

Mobil kredit merupakan mobil yang belum mempunyai kepemilikan secara sempurna, sehingga belum adanya BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) sebagai tanda bukti resmi kepemilikan. Adapun ilustrasi dari praktik transaksi over kredit mobil di Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka adalah:



Gambar 3. Ilustrasi akad jual beli dalam over kredit

Penjelasan:

- a. Pihak pertama over kredit (*muhil*)

Pihak pertama adalah orang yang mengover kreditkan mobil. Ia sudah tidak mampu melakukan pembayaran kredit

mobil kepada pihak bank dikarenakan kebutuhan ekonomi yang tidak stabil. Sehingga ia memutuskan untuk menjual mobil kredit dengan syarat melanjutkan pembayaran mobil kredit sampai lunas atas nama pihak pertama dan mengganti uang DP (*down of payment*) dengan jumlah yang sama. Oleh karena itu untuk menyelamatkan mobil dan sejumlah uang DP (*down of payment*) yang telah dibayarkan kepada pihak *leasing* , pihak pertama (*muhil*) melakukan over kredit mobil dengan menggunakan jasa makelar.

Kejelasan dalam transaksi menjadi perhatian ketika transaksi berlangsung. Dimana pihak pertama yang mengover kreditkan hanya menjelaskan spesifikasi kelebihan dan kekurangan dari mobil yang akan diover kreditkan dan biaya yang harus ditanggung untuk melunasi mobil tersebut. Dengan begitu, pihak pertama hanya memberitahu tentang besaran hutang yang ditanggung dalam jangka waktu 12 bulan mendatang.

Kasus over kredit mobil di Kecamatan Sukahaji, kebanyakan pemilik mobil berasal dari kota Cirebon yang sudah mengalami kredit macet. Dengan melakukan over kredit mobil yang tidak mampu dibayar tepat waktu, ia telah menyelamatkan mobil dan uang muka (*down of payment*) yang

diberikan kepada *leasing*. Sehingga ia tidak mengalami kerugian besar dan terbebas dari tagihan *debt collector*.⁵

Kepemilikan mobil over kredit masih belum sempurna. Hal ini dikarenakan pihak bank *leasing* dan debitur masih terikat jaminan fidusia, dimana surat yang diberikan hanya berupa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan). Adapun BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) masih dalam penahanan bank sampai kendaraan lunas.⁶

Dalam kasus transaksi over kredit mobil di Kecamatan Sukahaji, pihak pertama yang mengover kreditkan mobil sudah tidak mampu untuk melanjutkan pembayaran kredit mobil. Sehingga pihak pertama melakukan over kredit mobil dengan mengajukan syarat melanjutkan pembayaran hutang kredit yang dibebankan kepada pihak ketiga. Dengan begitu pihak pertama tidak mengalami kerugian terhadap mobil yang sudah ia bayar dan mendapatkan kembalian DP (*down of payment*) atau uang muka pihak pertama yang dibayarkan kepada bank *leasing* dengan jumlah yang sama. Transaksi yang dilakukan hanya sebatas ucapan. Dimana kejelasan yang diberikan hanya sebatas spesifikasi kekurangan dan kelebihan dari mobil yang di over kreditkan tersebut. Adapun mengenai pembiayaan tunggakan dan kepemilikan mobil tidak dijelaskan secara rinci oleh pihak

⁵ Wawancara Pak Ondo, pihak makelar dalam transaksi over kredit mobil di Kecamatan Sukahaji pada 10 Juli 2017.

⁶ Wawancara bapak Haryana “pimpinan bank BJB Syariah Majalengka”, pihak kedua dalam transaksi over kredit mobil di Kecamatan Sukahaji pada 24 Juli 2017.

pertama. Sehingga menimbulkan spekulasi baru pihak pertama untuk mendapatkan keuntungan.

b. Pihak ketiga over kredit (*muhal 'alaihi*)

Pihak ketiga adalah orang yang membutuhkan mobil dan menerima pengalihan hutang dari pihak pertama. Pengalihan hutang tersebut tidak terikat hutang kepada pihak pertama, akan tetapi hanya sebatas syarat yang harus dipenuhi. Terbatasnya biaya dan proses yang lebih mudah, menjadi daya tarik masyarakat Kecamatan Sukahaji untuk membeli mobil secara over kredit.

Syarat yang harus dipenuhi tidak hanya pada pengalihan hutang yang harus dibayarkan pihak ketiga, melainkan pembayaran DP (*down payment*) atau uang muka yang diberikan kepada pihak pertama. Uang muka yang diberikan harus sama jumlah dengan yang diberikan pihak pertama kepada bank *leasing* Hal ini disampaikan dalam transaksi secara lisan tidak tertulis dalam materai.

Transparansi dalam bertransaksi sangat dianjurkan. Hal ini berpengaruh pada kelancaran dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit mobil. Adapun kejelasan ketika transaksi over kredit mobil berlangsung, pihak pertama menjelaskan berapa besar biaya yang ditanggung sebagai pelimpahan pembayaran kredit dan DP (*down of payment*) yang harus

dibayarkan. Sehingga hadirnya para pihak yang bertransaksi menjadi keharusan untuk mencapai kesepakatan.

Kepemilikan mobil belum sempurna menjadi salah satu perhatian penting dalam pembayaran dan pemakaian mobil kredit. Karena hanya STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) yang diserahkan sebagai pegangan ketika transaksi dilakukan. Adapun mengenai kepemilikan BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) masih dalam penahanan sebagai agunan sebelum mobil dibayar secara lunas. Terkait pelunasan menjadi suatu keharusan pihak ketiga dalam pembayaran kredit mobil secara tepat waktu. Hal ini berpengaruh pada pihak pertama yang masih terikat jaminan fidusia dengan bank *leasing* tersebut.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa warga Kecamatan Sukahaji, transaksi over kredit mobil sudah ada sejak tahun 1998 sampai sekarang dan terkenal pada tahun 2016.⁷ Tujuan over kredit mobil untuk menunjang pendistribusian produk dalam sektor pertanian maupun perdagangan. Didukung dengan biaya murah dan proses lancar menjadi ketertarikan pihak ketiga untuk mendapatkan mobil secara over kredit.

Transaksi over kredit dilakukan secara lisan dan tidak tertulis diatas materai yakni dibuktikan dengan adanya ijab oleh

⁷ Wawancara dengan pak Ondo, pihak makelar pada transaksi over kredit mobil di Kecamatan Sukahaji pada 10 Juli 2017.

pihak pertama “*abdi kaluarkeun mobil ieu nu sasuai sareng kasepakatan dimana anjeun anu ngalajeungkeun bayar anu janteun sameutan abdi ka bank “anu” sareng bayar ngansaukur jumlah DP anu kantos abdi bayarkeun tipayun*”⁸ dan kabul oleh pihak ketiga “*abdi tarima*”. Ketika transaksi berlangsung pihak pertama hanya menyampaikan syarat, yakni berupa pengalihan hutang dan pengembalian DP (*down payment*) sekitar 30 juta. Dimana transparansi terkait pembayaran yang menunggak ketika belum di over kredit tidak dijelaskan dalam akad, sehingga secara otomatis menjadi tanggungan pihak ketiga.⁹ Dengan begitu memicu adanya spekulasi keuntungan yang diperoleh pihak pertama.

Transaksi over kredit mobil yang dilakukan pihak pertama dan ketiga diluar kesepakatan bank *leasing*. Hal ini dibuktikan dengan tidak dilakukan pengalihan nama dan pembaharuan kontrak perjanjian kredit mobil. Akan tetapi ketidaktahuan pihak bank tidak membuat para pihak yang bertransaksi merasa khawatir terhadap resiko yang akan terjadi selagi pembayaran mobil kredit oleh pihak ketiga tepat waktu.

⁸ “saya jual mobil ini sebagaimana sesuai dengan kesepakatan, dimana pembayaran anda cukup dengan melanjutkan pembayaran hutang saya kepada pihak bank dan pengembalian uang DP”.

⁹ Wawancara dengan pak udi, pihak ketiga *muhal ‘alaihi* dalam transaksi over kredit mobil di Kecamatan Sukahaji pada 11 Juli 2017.

c. Makelar

Makelar berperan sebagai penghubung pihak pertama dan pihak ketiga. Makelar berasal dari Desa Salagedang. Dimana makelar hanya sebagai profesi sampingan ketika ada yang membutuhkan jasa over kredit kendaraan. Dari data yang diperoleh peneliti, makelar mengambil keuntungan sekitar 0,3 % dari DP (*down of payment*) yang dibayarkan pihak ketiga.¹⁰

Dalam proses mendapatkan orang yang berkepentingan untuk melakukan over kredit hanya melalui masyarakat, tidak ada kerjasama pihak lain. Begitupun dengan penentuan harga, makelar tidak ikut serta dalam penentuan harga yang disepakati antara pihak pertama dan ketiga, karena pada hakikatnya peran makelar hanya sebatas penghubung bukan pihak yang berkepentingan.

Berkembangnya transaksi over kredit mobil di Kecamatan Sukahaji dilatarbelakangi oleh tidak seimbangannya kebutuhan dan keadaan ekonomi masyarakat. Dimana keberadaan mobil menjadi transportasi penting dalam pengangkutan barang produksi masyarakat untuk dikirim ke berbagai daerah. Hal ini diluar jangkauan ekonomi masyarakat, sehingga over kredit menjadi pilihan.

Tingkat kesadaran masyarakat terkait berbagai resiko yang harus dihadapi dari transaksi over kredit mobil secara

¹⁰ Wawancara dengan pak Ondo, pihak makelar pada transaksi over kredit mobil di Kecamatan Sukahaji pada 10 Juli 2017.

illegal, tidak menjadi kekhawatiran masyarakat. Meskipun BPKB (Bukti Pemilki Kendaraan Bermotor) yang masih dalam penahanan bank *leasing* tidak menghalangi masyarakat untuk tetap melakukan over kredit mobil. Hal ini dikarenakan biaya pengalihan nama dalam BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) yang memberatkan masyarakat. Sehingga tidak ada pemberitahuan kepada pihak bank *leasing* terkait adanya transaksi over kredit mobil antara pihak pertama dan pihak ketiga menjadi pilihan pihak yang bertransaksi.¹¹

¹¹ Wawancara dengan pak H. Aceng, pihak ketiga *muhal 'alaihi* dalam transaksi over kredit mobil di Kecamatan Sukahaji pada 10 Juli 2017.

BAB IV

**ANALISIS PENERAPAN AKAD HAWALAH DALAM
TRANSAKSI OVER KREDIT MOBIL DI KECAMATAN
SUKAHAJI KABUPATEN MAJALENGKA DITINJAU
BERDASARKAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL
NO:12/DSN-MUI/IV/2000**

A. Penerapan Akad Hawalah dalam Transaksi Over Kredit Mobil di Kecamatan Sukahaji

Over kredit mobil di Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka merupakan transaksi yang lazim dilakukan masyarakat sebagai salah satu upaya ketika mengalami kesulitan. Dimana masyarakat yang membutuhkan biaya untuk kehidupan sehari-hari dan membutuhkan mobil dipertemukan dalam satu tempat transaksi melalui jasa makelar. Pada prinsipnya transaksi over kredit sama dengan akad *hawalah* dalam fikih muamalah, dimana akad *hawalah* merupakan akad *tabarru* yang dimaksudkan untuk tolong menolong dan murni semata-mata karena mengharapkan ridha dari Allah SWT, sama sekali tidak mencari keuntungan komersil.¹

Terlepas dari masyarakat yang membutuhkan biaya kehidupan sehari-hari adalah masyarakat yang sudah tidak mampu melanjutkan pembayaran mobil kredit yang harus disetorkan setiap bulannya ke bank *leasing*. Harga pokok dan bunga yang harus dibayar semakin tinggi dan kebutuhan ekonomi tidak seimbang, hal

¹ Madani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, h. 77.

ini yang menjadi keharusan masyarakat untuk melakukan transaksi over kredit. Berbeda dengan masyarakat yang lebih membutuhkan mobil, tujuan masyarakat cenderung lebih mengedepankan manfaat mobil untuk menunjang bisnis dalam angkut barang produksi yang sedang berkembang pada sektor perdagangan maupun pertanian.

Beragamnya faktor masyarakat dalam melakukan transaksi over kredit mobil tidak lepas dari peran jasa makelar. Makelar hanya sebagai penghubung antara pihak yang mengover kreditkan mobil dan pihak yang menerima over kredit mobil. Terkait praktiknya makelar tidak ikut serta dalam kesepakatan harga over kredit mobil. Meskipun di satu sisi terjadi transaksi pengalihan hutang dalam pelunasan, hanya pihak yang mengover kreditkan mobil dan pihak yang menerima over kredit yang menyetujuinya. Dengan begitu transaksi pengalihan hutang dalam pengertian *hawalah* adalah akad pengalihan hutang dan piutang dari pihak yang berhutang atau berpiutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau menerimanya.²

Dalam praktik transaksi over kredit mobil di Kecamatan Sukahaji, masyarakat melakukan transaksi over kredit mobil tidak saling terikat karena hutang piutang akan tetapi karena saling membutuhkan. Dimana masyarakat yang mengover kreditkan mobil karena terdesaknya kebutuhan ekonomi dan yang menerima over kredit karena membutuhkan mobil murah dan proses cepat.

² Heru Wahyudi, *Fiqh Ekonomi*, Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung, 2012, h. 282.

Penerimaan over kredit tidak hanya menanggung pengalihan kredit, melainkan pembayaran DP (*down of payment*) mobil dengan jumlah yang sama ketika pembelian mobil pertama. Hal ini menjadi syarat yang harus dipenuhi. Dengan begitu transaksi over kredit yang dilaksanakan masyarakat Kecamatan Sukahaji termasuk *hawalah muthlaqah* di mana *muhiil* adalah orang yang berhutang tetapi tidak berpiutang kepada *muhal alaihi*.³

Keabsahan *hawalah* melegitimasi pada surat Al-Mai'idah ayat 2:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ...

“.....Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.....”⁴

Sedangkan hadis yang mengabsahkan akad *hawalah* adalah:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ دَكْوَانَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَمَنْ أَتْبَعَ عَلَىٰ مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ibnu Dzakwan dari Al A'raj dari Abu Hurairah RA dari Nabi SAW bersabda: “Menunda membayar hutang bagi orang kaya adalah kezhaliman dan apabila

³ Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015, h. 137.

⁴ Perpustakaan Nasional RI, *Al-Quran dan Tafsirnya*, Jakarta: Widya Cahaya, 2015, h. 349.

seorang dari kalian hutangnya dialihkan kepada orang kaya, hendaklah ia ikuti.”⁵

Berlakunya pengalihan hutang dalam transaksi over kredit sangat memudahkan masyarakat yang membutuhkan pertolongan, baik dalam segi kebutuhan ekonomi maupun kebutuhan transportasi. Akan tetapi karena kurangnya pemahaman masyarakat dalam memenuhi kebutuhan tersebut, menjadikan peluang bisnis bagi makelar untuk memberikan jasa over kredit mobil. Dimana masyarakat yang membutuhkan mobil tidak melalui pihak *dealer* melainkan makelar. Dengan begitu sudah menjadi tanggung jawab makelar mencari masyarakat yang memerlukan transaksi over kredit mobil dalam perpindahan hutang.

Berdasarkan data yang penulis peroleh, akad dalam transaksi over kredit mobil di Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka menggunakan akad lisan yakni perbuatan tertentu yang menunjukkan keinginan untuk berakad.⁶ Misalnya apabila seseorang meninggalkan barang-barang di hadapan orang lain, kemudian dia pergi dan orang yang ditinggali barang-barang itu berdiam diri saja, hal itu dipandang telah ada akad *ida'* (titipan) antara orang meletakkan barang dan yang menghadapi barang titipan ini dengan

⁵ Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abdul Hadi Al-Maqsidi, *Ensiklopedi Hadits-Hadits Hukum*, terj. Suharlan dan Agus Ma'mun, Jakarta: Darus Sunah Press, 2013. 991.

⁶ Oni Sahroni, M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016, h. 33.

jalan *dalalah al-hal* (petunjuk).⁷ Sehingga tidak ada bukti diatas materai.

Transaksi over kredit di Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka tidak berdasarkan persetujuan pihak bank *leasing*. Hal ini dilakukan secara terselubung, hanya *muhil*, *muhal* '*alaihi* dan makelar yang berada dalam satu majelis akad. Adapun objek transaksi berupa mobil ada pada saat akad berlangsung.

Ketentuan dalam akad harus memuat asas kejujuran, dimana masyarakat yang mengover kreditkan mobil memberikan keterangan pada saat akad berlangsung. Adapun yang disampaikan melingkupi keadaan fisik mobil dan syarat yang harus dipenuhi.⁸ Dari kedua syarat yang harus terpenuhi yaitu pengalihan hutang pihak yang mengover kreditkan ke pihak yang menerima over kredit dan DP (*down of payment*) oleh pihak yang menerima over kredit sebesar 30 juta yang diberikan kepada pihak yang mengover kreditkan mobil.

Kepemilikan mobil masih belum sempurna. Hal ini dikarenakan pihak bank *leasing* dan debitur masih terikat jaminan fidusia. Dimana surat yang diberikan hanya berupa STNK (surat tanda nomor kendaraan). Sehingga belum ada BPKB (bukti pemilik kendaraan bermotor) sebagai tanda bukti resmi kepemilikan karena masih dalam penahanan bank *leasing* sampai kendaraan lunas. Adapun terkait BPKB yang masih ditahan, tidak ada upaya kedua

⁷ Abdul Rahman Ghazaly, et al. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Pranadamedia Group, 2015, h. 53.

⁸ Wawancara dengan pak H. Aceng, pihak ketiga *muhal* '*alaihi* dalam transaksi over kredit mobil di Kecamatan Sukahaji pada 10 Juli 2017.

belah pihak untuk mengkonfirmasi pihak bank *leasing* dalam pengalihan nama ketika transaksi over kredit berlangsung.⁹

Dari keterangan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa transaksi over kredit mobil sama hal nya dengan akad *hawalah*. Dimana pengalihan hutang menjadi suatu syarat dalam transaksi over kredit mobil. Disamping pengalihan hutang sebagai syarat dalam transaksi over kredit mobil pihak ketiga (*muhal 'alaihi*) masih dibebankan dengan pembayaran DP (*down of payment*) yang harus dibayarkan seketika itu juga. Adapun faktor utama terlaksanya transaksi over kredit adalah ketidak sanggupan pihak pertama (*muhil*) untuk melanjutkan pembayaran kredit mobil sehingga dilimpahkan kepada pihak ketiga (*muhal 'alaihi*) yang membutuhkan mobil kredit murah dan proses cepat.

Terikatnya fidusia antara pihak pertama (*muhil*) dan bank *leasing* tidak memberikan keleluasaan pihak pertama (*muhil*) untuk melakukan transaksi over kredit. Dengan begitu transaksi yang dilaksanakan tidak disepakati untuk mengkonfirmasi pihak bank *leasing*. Hal ini menyebabkan BPKB (bukti pemilik kendaraan bermotor) tidak dilakukannya pengalihan nama, karena akan dibebankan biaya tambah dalam pengalihan nama. Sedangkan biaya pengalihan nama jauh dari kemampuan masyarakat yang berakad.

⁹ Wawancara dengan pak udi, pihak ketiga *muhal 'alaihi* dalam transaksi over kredit mobil di Kecamatan Sukahaji pada 11 Juli 2017.

B. Analisis Transaksi Over Kredit Mobil di Tinjau Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No:12/DSN-MUI/TV/2000.

Islam adalah agama yang komprehensif (*rahmatat lil'alam*) yang mengatur semua aspek kehidupan manusia yang telah disampaikan oleh Rasulullah, Muhammad SAW. Salah satu bidang yang diatur adalah masalah aturan atau hukum, baik yang berlaku secara individual maupun sosial, atau lebih tepatnya, Islam mengatur kehidupan bermasyarakat.

Islam sebagai agama realistis, artinya hukum Islam tidak mengabaikan kenyataan dalam setiap perkara yang dihalalkan dan yang diharamkannya, juga tidak mengabaikan realitas dalam setiap peraturan dan hukum yang ditetapkan, baik untuk individu, keluarga, masyarakat, negara maupun umat manusia. Dalam klarifikasi kajian ekonomi syariah, melingkupi hukum-hukum yang berhubungan dengan pergaulan hidup dalam masyarakat mengenai kebendaan dan hak-hak serta penyelesaian persengketaan-persengketaan, seperti jual beli, sewa-menyewa, utang-piutang, gadai, *hibah*, dan sebagainya.¹⁰

Syariat Islam juga menjelaskan ketentuan akad yang berdasarkan pada rukun dan syarat. Hal ini berpengaruh terhadap keberlangsungan over kredit mobil. Akad yang digunakan menggunakan akad secara lisan oleh pihak yang berakad (*muhil* dan *muhal 'alaihi*). Dimana yang menjadi ketentuan dalam transaksi

¹⁰ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012, h. 4

over kredit mobil di Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka tidak memenuhi ketentuan rukun dan syarat sahnya akad. Hal ini dibuktikan dengan ketidakhadiran pihak bank *leasing* sebagai *muhal*, sehingga tidak ada pernyataan dan kehendak (*shighat*) dari bank *leasing* terhadap transaksi over kredit mobil tersebut. Dengan kata lain tidak dinyatakan dalam satu majlis akad (*majlisul 'aqd*) atau bisa dikatakan merupakan suatu kondisi yang memungkinkan untuk membuat kesepakatan atau pertemuan untuk membicarakan dalam satu objek transaksi.¹¹

Terbebas dari *gharar* merupakan salah satu syarat keabsahan suatu akad.¹² Dimana pengaruh *gharar* terhadap akad bisnis terletak pada *shigat* akad, objek akad atau syarat akad. Dalam hal ini ketentuan hukum *gharar* dilarang dalam syariat Islam, oleh karena itu melakukan transaksi atau memberikan syarat dalam akad yang ada unsur *ghararnya* itu hukumnya tidak boleh, sebagaimana hadis Rasulullah SAW:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Rasulullah Saw. Melarang jual beli yang mengandung *gharar*”.¹³

¹¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012, h. 24.

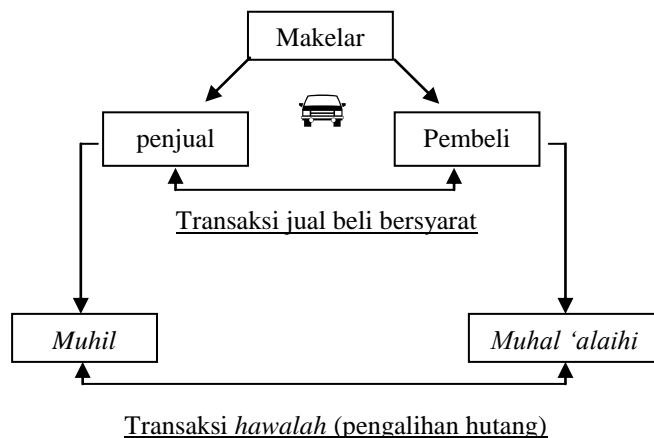
¹² Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, h. 37.

¹³ Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih & Ekonomi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015, h. 77.

Imam Nawawi menjelaskan, bahwa hadis ini menjelaskan di antara praktik-praktik bisnis terlarang dalam fikih muamalah, maka *gharar* dan *riba* adalah praktik bisnis yang memiliki ruang lingkup dan cakupan luas.

Sedangkan bentuk kesepakatan dalam over kredit mobil mencakup dua transaksi yakni transaksi jual beli dan transaksi *hawalah* (pengalihan hutang). Dimana *hawalah* menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi *muhal* 'alaihi sebagai pihak ketiga dari terlaksananya transaksi jual beli dalam tempo waktu yang sama. Begitu pula dalam memberikan keterangan, pihak *muhal* menjelaskan hanya sebatas sifat dan jenis objek akad tidak mencakup pada jumlah dari keseluruhan hutang terutama dalam jumlah tunggakan sebelum transaksi over kredit mobil berlangsung. Hal ini menyebabkan hutang bertambah yang harus ditanggung oleh pihak *muhal* 'alaihi diluar kesepakatan dalam akad.

Dengan begitu transaksi over kredit mobil di Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka memuat larangan dalam syarat keabsahan akad yaitu mengandung unsur *gharar* dalam *Shigat* yakni *al-jam'u baina bai'atani fi bai'ah* (menggabungkan dua akad dalam satu transaksi) dan *gharar* dalam memberikan kejelasan objek akad. Sebagaimana ilustrasi transaksi over kredit:



Berdasarkan ijma ulama menegaskan bahwa setiap akad yang mengandung *gharar* baik itu *gharar shigat* ataupun *gharar objek*, maka akad itu tidak sah karena dalam transaksi ini ada ketidakjelasan yang bisa menyebabkan perselisihan (*jahalah fahisyah*)¹⁴.

Transaksi over kredit mobil dalam pengertian *hawalah* adalah akad pengalihan hutang dan piutang dari pihak yang berhutang atau berpiutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau menerimanya.¹⁵ *Hawalah* disyariatkan berdasarkan Hadis, *ijma'*, dan kaidah *fiqh*. Dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda:

¹⁴ Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih & Ekonomi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015, h. 89.

¹⁵ Heru Wahyudi, *Fiqih Ekonomi*, Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung, 2012, h. 282.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ دَكْوَانَ عَنْ الْأَعْرَجِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَمَنْ أَتْبَعَ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ibnu Dzakwan dari Al A’raj dari Abu Hurairah RA dari Nabi SAW bersabda: “Menunda membayar hutang bagi orang kaya adalah kezhaliman dan apabila seorang dari kalian hutangnya dialihkan kepada orang kaya, hendaklah ia ikuti.” (HR. Bukhari)¹⁶

Pada hadis tersebut Rasulullah memberitahukan kepada orang yang mengutangkan, jika orang yang berhutang menghawalahkan atau melimpahkan hutangnya kepada orang yang kaya/mampu, hendaklah ia menerima *hawalah* tersebut dan hendaklah ia menagih kepada orang yang dihawalahkan (*muhal ‘alaihi*). Dengan demikian haknya terpenuhi.¹⁷ Akan tetapi, kasus *hawalah* dalam transaksi over kredit mobil di Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka tidak sesuai dengan aturan syariat Islam. Karena di dalam aturan Islam, *hawalah* harus memenuhi rukun dan syarat-syarat yang telah ditentukan. Adapun rukun *hawalah* berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 12/DSNMUI/IV/2000 di antaranya:

1. *Muhil* (orang yang berhutang dan berpiutang)
2. *Muhal* (orang yang berpiutang kepada *muhil*)

¹⁶ Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014, h. 110

¹⁷ Heru Wahyudi, *Fiqh Ekonomi*, Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung, 2012, h. 283.

3. *Muhal 'Alaih* (orang yang berhutang kepada *muhil* dan wajib membayar hutang kepada *muhal*)
4. *Muhal Bih* (hutang *muhil* kepada *muhal*)
5. *Sighat* (ijab-kabul). Dalam ijab kabul akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.¹⁸

Berdasarkan praktiknya, *hawalah* dalam over kredit mobil di Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka tidak memenuhi rukun yang telah ditetapkan Fatwa DSN MUI. Keberadaan orang-orang yang berakad dalam satu majelis merupakan salah satu rukun yang harus terpenuhi. Akan tetapi ketika akad *hawalah* berlangsung hanya kehadiran pihak *muhil*, *muhal 'alaih*, makelar dan saksi. Dengan tidak memberi konfirmasi atau pemberitahuan kepada pihak bank *leasing* selaku *muhal* terkait over kredit, menjadi kesepakatan *muhil* dan *muhal 'alaihi* yang menganggap bahwa kehadiran bank *leasing* menjadi faktor penghambat transaksi *hawalah* dalam over kredit mobil, karena akan banyak pertimbangan-pertimbangan bank *leasing* untuk menyetujui pengalihan hutang atau *hawalah* dalam over kredit mobil tersebut.¹⁹

Dengan begitu, transaksi over kredit mobil di Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka telah melanggar aturan syarat dan rukun *hawalah* yang telah ditetapkan fatwa DSN MUI dan

¹⁸ Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014,

¹⁹ Wawancara dengan pak H. Aceng, pihak ketiga *muhal 'alaihi* dalam transaksi over kredit mobil di Kecamatan Sukahaji pada 10 Juli 2017.

bertentangan dengan kebsahan akad. Dimana pernyataan ijab kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad) ²⁰ untuk menyepakati pengalihan hutang dan memfokuskan transaksi over kredit hanya dalam akad *hawalah*. Dengan begitu jelas transaksi over kredit mobil telah keluar dari ketetapan fatwa Dewan Syariah Nasional No: 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang *hawalah*. Menurut mayoritas ulama, akad *hawalah* dalam transaksi over kredit mobil mengandung sifat *bathil* yaitu akad yang tidak memenuhi rukun, syarat, dan sifatnya, maka akad tersebut dinamakan menjadi akad tidak sah juga akad *fasid* dan *bathil* dalam waktu yang sama, karena istilah *fasid* dan *buthlan* adalah sinonim akad tidak sah.²¹

²⁰ Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014, h. 110

²¹ Oni Sahroni & M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016, h. 98.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti membahas secara keseluruhan, peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan akad *hawalah* dalam transaksi over kredit mobil di Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka, dalam penerapannya pihak *muhil* melimpahkan hutang kepada *muhal* *'alaihi* melalui jasa makelar dengan ketentuan jumlah sisa hutang yang telah disepakati ketika transaksi over kredit berlangsung. Dalam prakteknya Over kredit mobil di Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka terdapat akad jual beli mobil kredit yang menjadikan *hawalah* salah satu syarat yang harus dipenuhi. Akad *hawalah* dalam transaksi over kredit mobil di Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka dilakukan secara terselubung dengan secara lisan. Dimana pihak-pihak yang berakad dalam akad *hawalah* hanya 1) *muhal* 2) *muhal* *'alaihi* dan 3) makelar sedangkan pihak *muhal* yakni bank *leasing* tidak mengetahui adanya akad *hawalah* dalam over kredit mobil. Sehingga tidak ada pengalihan nama BPKB (bukti pemilik kendaraan bermotor) yang dijadikan jaminan antara *muhil* dan *muhal*.
2. Ditinjau berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang *hawalah*. Dalam praktik Transaksi over kredit mobil di Kecamatan Sukahaji Kabupaten

Majalengka tidak memenuhi rukun dan syarat dalam berakad yaitu tidak ada *shigat* akad *muhal* (bank *leasing*) untuk memberikan kesepakatan beralihnya pembayaran hutang *muhal* kepada *muhal* 'alaih dengan dibuktikannya BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) atas nama *muhil* yang dijadikan jaminan yang mengikat antara *muhil* selaku debitur dan *muhal* selaku kreditur. Di samping itu transaksi over kredit mobil di Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka mengandung unsur *gharar shigat* dalam berakad karena menggabungkan dua akad dalam satu transaksi (*al-jam'u baina bai'ataini fi bai'ah*) yakni transaksi jual beli dan transaksi *hawalah* (pengalihan hutang) dan tidak adanya kejelasan dalam objek akad terhadap jumlah tunggakan yang belum disepakati . Sehingga transaksi over kredit mobil yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka tidak sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan fatwa DSN MUI. Atau dengan kata lain akad tersebut mengandung sifat *bathil* yaitu akad yang tidak memenuhi rukun, syarat dan sifatnya, maka akad tersebut dinamakan menjadi akad tidak sah juga akad *fasid* dan *bathil*.

B. Saran-Saran

Berdasarkan uraian diatas, maka beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Para pihak mengkonfirmasi bank *leasing* untuk melakukan over kredit mobil apabila pihak *muhil* sudah tidak mampu membayar

sisanya hutangnya. Kemudian pihak bank *leasing* akan melakukan analisa kelayakan transaksi over kredit mobil secara *financial*. Apabila permohonan over kredit mobil telah disetujui pihak bank akan melakukan pembaharuan kontrak kredit mobil dan mengenakan biaya over kredit tersebut baik itu biaya notaris ataupun asuransi, *muhal 'alaihi* akan menjadi debitur baru menggantikan posisi *muhil* sebagai debitur lama.

2. Kesadaran bagi para pihak terkait dengan proses *hawalah* atau pengalihan hutang yaitu antara *muhil* dan *muhal 'alaihi* hendaknya memperhatikan syarat sah dalam berakad.
3. Para pihak harus memperhatikan kerugian yang akan terjadi kemudian hari. Apabila diketahui para pihak melakukan wanprestasi (tidak membayar cicilan), dan melakukan over kredit kembali kepada pihak lain atau over kredit berantai, maka ia akan dikenakan hukuman tindak pidana penggelapan dan penyalahgunaan barang jaminan fidusia. Kemudian bagi pihak *muhal 'alaihi*, karena status BPKB (bukti kepemilikan kendaraan bermotor) masih jaminan yang disita bank *leasing*, suatu saat bisa saja mobil tersebut disita oleh *dept collector* dan aparat kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ajib, Ghufron. *Fiqh Muamalah II Kontemporer-Indonesia*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Al-Maqsidi, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abdul Hadi. *Ensiklopedi Hadits-Hadits Hukum*, terj. Suharlan dan Agus Ma'mun, Jakarta: Darus Sunah Press, 2013.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Amzah, 2014.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Darulfikir, 2011.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana Pranadamedia Group, 2014.
- Djazuli. *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta: Pranadamedia Group, 2016.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar: 2010, h.258.
- Ghazaly , Abdul Rahman, et al. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2003.

- Herdiansyah, Haris. *Wawancara, Observasi, dan Fokus Groups*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014.
- Janwari, Yadi. *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Karim, Adiwarman A, Oni Sahroni. *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Bab XIII *Hawalah*, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, 2009.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Pranadamedia Group, 2015.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Nadzir, Mohammad. *Fiqh Muamalah Klasik*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Perpustakaan Nasional RI, *Al-Quran dan Tafsirnya*, Jakarta: Widya Cahaya, 2015.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014.
- Rifa'I, Moh. at al. *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, Semarang: CV. Toha Putra, 1978.

- Sahrani, Sohari, Ruf'ah Abdullah. *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sahrani, Oni, M. Hasanuddin. *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Satori, Djam'an, Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Subekti, R, R. Tjitrosudibio. *Kitab UndangUndang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV Alfabeta, 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010.
- Suprihatin. *Al-Hawalah dan Relevansinya dengan Perekonomian Islam Modern*, Masalah, vol.2, no. 1, Maret 2011.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
- Wahyudi, Heru. *Fiqh Ekonomi*, Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung, 2012.
- Yusuf, Ahmad Muhammad. *Ensiklopedi Tematis Al-Qur'an & Hadits Jilid 7*, Jakarta: Widya Cahaya, 2016.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Imam Syafi'I Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits*, Jakarta: PT Niaga Swadaya, 2012.

Skripsi:

Chamidun, Abdillah. *Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Take Over Di PT. Federal International Finance Syari'ah Cabang Kudus*, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2009.

Fambudi, Aris. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Hiwalah*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2011.

Fatimah, Siti. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hiwalah di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Gedongkuning Yogyakarta*”, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Kulsum, Diah Umami. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Kredit Macet di Desa Jragung Kecamatan Karangawen Kabupaten Dema*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016.

Rosyidah, Nanik. *Perspektif Hukum Islam Terhadap Pengalihan Hutang Kepada Pihak Ketiga*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.

Internet:

<http://www.hukumonline.com>, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.PDF*.

<https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>, diakses 20 November 2017.

Wawancara:

Wawancara dengan pak udi, pihak ketiga *muhal* 'alaihi dalam transaksi over kredit mobil di Kecamatan Sukahaji pada 11 Juli 2017.

Wawancara dengan bos Surya, pihak ketiga *muhal* 'alaihi dalam transaksi over kredit mobil di Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka pada 15 Juli 2017.

Wawancara dengan pak H. Aceng, pihak ketiga *muhal* 'alaihi dalam transaksi over kredit mobil di Kecamatan Sukahaji pada 10 Juli 2017

Wawancara dengan pak Ondo, pihak makelar pada transaksi over kredit mobil di Kecamatan Sukahaji pada 10 Juli 2017

Wawancara dengan pak asep, pihak pertama *muhal* dalam transaksi over kredit mobil di Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka pada 10 Juli 2017.

Wawancara dengan pak. Ade maryadi (alm) yang diwakilkan istrinya, pihak pertama *muhal* dalam transaksi over kredit mobil di Kecamatan Sukahaji pada 10 Juli 2017.

Wawancara bapak Haryana “pimpinan bank BJB Syariah Majalengka”, pihak kedua dalam transaksi over kredit mobil di Kecamatan Sukahaji pada 24 Juli 2017.

Dokumen:

Dokumen Profil Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka.

Fatwa Dewan Syarian Nasional No: 12/DSNMUI/IV/2000 Tentang Hawalah.


Lampiran



(gambar 01. Alat Bukti Objek Transaksi Over Kredit Mobil)



(gambar 02. Alat Bukti Objek Transaksi Over Kredit Mobil)

 PT ASTRA SEDAYA FINANCE Jl. H. Roesario No. 80, Setiabudi, Jakarta Selatan, Indonesia 12130 Telp. +62 (0)21 788 8800 Fax. +62 (0)21 788 8100 Web: www.astrafinance.com		KWITANSI No. FC 2953007	
DIBAYAR OLEH: <u>Ade Maryadi</u>		No. Lelang: <u>694472</u> No. Perjanjian: <u>01-390324</u> Tgl. Jauh Tempo: <u>17-6-2017</u>	
BAYANGKAN: <u>Dio, Ima, Anggur, Rans, Lina, Rani, Rani</u>		No. Lelang: <u>694472</u> No. Perjanjian: <u>01-390324</u> Tgl. Jauh Tempo: <u>17-6-2017</u>	
Untuk Pembayaran: Angsuran ke-11 Rp 2.435.000 Denda Rp Late Charge Rp Pick Up Fee Rp 20.000 Total Rp 2.455.000		Monev 17-6-17 H. H. Apian 085 222 502 583	

(gambar 03. Alat Bukti Pembayaran Pihak Ketiga (Muhil 'Alaihi))

 PT ASTRA SEDAYA FINANCE Cabang CIREBON	
Nama: ADE MARYADI	
No. Perjanjian: 01200203003360326	
Tgl. Pembayaran: 17	setiap bulannya
Lama Angsur: 48	bulan
Nilai Angsur: 2.435.000	

(gambar 04. Alat Bukti Pihak Pertama (Muhil))

 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA BARAT SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR	
NOMOR REGISTRASI: 1425 KT	NAMA PEMILIK: AMUNG SUNARYA
ALAMAT: DN CICALAHANG RT 03/09 KEMERUKUN	ALAMAT: DN CICALAHANG RT 03/09 KEMERUKUN
MERK: DAIHATSU	MERK: DAIHATSU
TYP: F 600 (XENIA 1000cc)	TYP: F 600 (XENIA 1000cc)
ENIS: MOBIL PENUMPANG	ENIS: MOBIL PENUMPANG
MODEL: MINIBUS	MODEL: MINIBUS
TAHUN PEMBUATAN: 2005	TAHUN PEMBUATAN: 2005
SILINDER: 989 CC	SILINDER: 989 CC
NOMOR KENDARAAN: DN22387	NOMOR KENDARAAN: DN22387

(gambar 05. Alat Bukti Pihak Yang Tidak Diketahui)

HASIL WAWANCARA PIHAK PERTAMA (*muhil*)

Nama : bapak Ade Maryadi (alm) diwakilkan ibu ade maryadi (istri)

Usia : 40 thn

1. Apakah anda membeli kendaraan mobil secara kredit?

Jawab: iya

2. Kapan anda membeli kendaraan mobil secara kredit?

Jawab: sekitar tahun 2014

3. Bagaimana cara anda mengatasi kredit macet kendaraan mobil yang anda beli?

Jawab: saya over kreditkan kendaraan tersebut melalui makelar

4. Apa alasan anda melakukan transaksi over kredit kendaraan mobil yang tidak bisa anda lunasi?

Jawab: karena pada saat itu suami saya sakit gagal ginjal dan saya membutuhkan biaya pengobatan, untuk itu saya menjual dua mobil (xenia dan grand max) secara over kredit.

5. Bagaimana resiko dari kendaraan mobil yang anda over kreditkan?

Jawab: saya sepenuhnya telah melimpahkan semua urusan kepada makelar. Untuk resiko saya kurang tahu karena yang saya butuhkan biaya pengobatan untuk suami saya.

6. Apa keuntungan anda dari transaksi over kredit?

Jawab: untuk keuntungan yang saya peroleh hanya biaya dp awal ketika suami saya membeli mobil tersebut senilai 29 juta.

HASIL WAWANCARA PIHAK KETIGA (*Muhal 'alaihi*)

Nama : bapak H. Aceng

Usia : 65 thn

1. Sejak kapan anda membeli mobil secara over kredit?

Jawab: sejak bulan oktober 2016

2. Apa alasan anda membeli mobil secara over kredit?

Jawab: karena memudahkan meski harus dengan cicilan dan kebutuhan supir pribadi saya untuk mengangkut dan mengantar barang dagangan.

3. Bagaimana proses anda ketika melakukan transaksi over kredit mobil?

Jawab: ada penawaran dari supir pribadi saya (pak. Soleh) bahwa ada yang ingin mengover kreditkan mobil grand max tahun 2014. Karena terdesaknya kebutuhan dalam mengangkut barang dagangan, saya memutuskan untuk membelinya secara over kredit. Dalam perjanjian tersebut secara lisan saya harus mengembalikan dp awal ketika pihak pertama membeli mobil secara kredit tersebut sebesar 30 juta dan dalam sisa pembayaran 15 bulan dari bulan oktober 2016-desember 2017 menjadi tanggungan saya atas nama pihak pertama sebesar Rp. 2.435.000/bulan kepada depkolektor dari PT. Astra Sedaya Finance Cirebon.

4. Bagaimana resiko membeli mobil secara over kredit?

Jawab: sejauh ini untuk resiko yang ditanggung tidak ada karena pembayaran perbulan lancar. Adapun pada awal pembelian makelar tidak memberitahukan bahwa mobil tersebut berada dalam masa

dendaan yaitu sebesar Rp. 3. 500.000. Dimana jika kredit yang telah saya lunasi dan dendaan awal belum dilunasi maka BPKB belum bisa di ambil dan dialih namakan.

5. Mengapa bpkb masih atas nama pihak pertama?

Jawab: karena jika BPKB sayah alih namakan akan dikenakan BBN (biaya beralih nama). Seperti yang diketahui pada perjanjian awal akan dikenakan biaya sebesar RP. 5 juta.

6. Apakah pihak bank mengetahui adanya transaksi over kredit mobil?

Jawab: tidak mengetahui.

HASIL WAWANCARA MAKELAR

Nama : Mang Ondo

Umur : 47 thn

1. Apakah makelar adalah sebuah profesi anda?

Jawab: iyah sampingan

2. Berapa keuntungan yang anda dapat?

Jawab: 0,3% dari dp yang dibayarkan oleh pihak ketiga

3. Kenapa banyak masyarakat yang melakukan over kredit kendaraan?

Jawab: terdesaknya kebutuhan. Kalo yang saya tangani itu karena pihak pertama membutuhkan biaya pengobatan suaminya yang berada dirumah sakit dan kebetulan bapak tersebut adalah majikan saya.

4. Bagaimana kesepakatan harga kendaraan yang diover kreditkan?

Jawab: pihak ketiga dibebankan mengembalikan dp awal ketika pihak pertama membeli mobil secara kredit sebesar Rp. 29 juta dan melunasi kredit mobil pihak pertama yang dibeli pihak ketiga atas nama pihak pertama. Keuntungan yang diberikan 0,3% dari biaya dp yang dibayarkan pihak ketiga.

5. Apakah pelaku over kredit mempermasalahkan BPKB?

Jawab: tidak selagi pihak ketiga amanah dalam melunasi kreditnya.

6. Apakah pihak bank mengetahui adanya transaksi over kredit mobil?

Jawab: tidak.

HASIL WAWANCARA PIHAK PERTAMA (*muhil*)

Nama : bapak asep

Umur :

1. Apakah anda membeli kendaraan secara kredit?

Jawab: ya, kendaraan mobil Toyota engkel

2. Kapan anda membeli kendaraan mobil secara kredit?

Jawab: sekitar tahun 2012

3. Bagaimana cara anda mengatasi kredit macet terhadap kendaraan mobil yang anda beli?

Jawab: saya mengover kreditkan mobil tersebut

4. Kapan anda mengover kreditkan kendaraan mobil?

Jawab: sekitar tahun 2014

5. Apa alasan anda melakukan transaksi over kredit?

Jawab: terdesak ekonomi, sehingga tidak bisa melanjutkan pembayaran kredit.

6. Apa keuntungan anda dari transaksi over kredit kendaraan mobil?

Jawab: saya memperoleh keuntungan sebesar Rp. 20 jt dari biaya dp awal ketika saya membeli mobil.

7. Apakah pihak bank mengetahui adanya transaksi over kredit kendaraan mobil yang anda lakukan?

Jawab: iya, pihak bank mengetahui dan dilakukannya pengalihan nama sebesar Rp. 1, 5 jt yang dibebankan kepada saya.

HASIL WAWANCARA PIHAK PERTAMA (*muhil*)

Nama : bapak asep

Umur :

1. Apakah anda membeli kendaraan secara kredit?

Jawab: ya, kendaraan motor tiger

2. Kapan anda membeli kendaraan motor secara kredit?

Jawab: sekitar tahun 2005

3. Bagaimana cara anda mengatasi kredit macet terhadap kendaraan motor yang anda beli?

Jawab: saya mengover kreditkan motor tersebut

4. Kapan anda mengover kreditkan kendaraan motor?

Jawab: enam bulan dari pembelian secara kredit.

5. Apa alasan anda melakukan transaksi over kredit?

Jawab: terdesak ekonomi, sehingga tidak bisa melanjutkan pembayaran kredit.

6. Apa keuntungan anda dari transaksi over kredit kendaraan mobil?

Jawab: saya memperoleh keuntungan sebesar Rp. 10 jt dari biaya dp awal ketika saya membeli motor.

7. Apakah pihak bank mengetahui adanya transaksi over kredit kendaraan mobil yang anda lakukan?

Jawab: tidak

HASIL WAWANCARA PIHAK KETIGA (*muhal 'alaihi*)

Nama : mang udi

Umur :

1. Sejak kapan anda membeli mobil secara over kredit?

Jawab: sejak bulan oktober 2016

2. Apa alasan anda membeli mobil secara over kredit?

Jawab: karena memudahkan meski harus dengan cicilan, lebih murah karena membayar setengah harga.

3. Bagaimana proses anda melakukan transaksi over kredit mobil?

Jawab: mobil yang saya terima adalah xenia thn 2005 warna silver keadaan mulus, saya hanya dibebankan biaya dp sebesar Rp. 25 jt kepada pihak pertama dan meneruskan pembayaran kredit mobil atas nama bapak among sunarya yang disetorkan langsung ke bank clipan Cirebon.

4. Bagaimana resiko membeli mobil secara over kredit?

Jawab: sejauh ini untuk resiko yang ditanggung tidak ada karena pembayaran perbulan lancar. Adapun pada hak kepemilikan kendaraan/BPKB bukan atas nama bapak ade maryadi ketika transaksi berlangsung melainkan atas nama bapak among sunarya yang diketahui yang mengover kreditkan kendaran pertama sebelum bapak ade maryadi, dan pihak makelar pun tidak memberikan keterangan terkait hal itu.

5. Mengapa bpkb masih atas nama pihak pertama?

Jawab: karena jika BPKB sayah alih namakan akan dikenakan BBN (biaya beralih nama). Seperti yg diketahui pada perjanjian awal akan dikenakan biaya sebesar RP. 5 juta.

6. Apakah pihak bank mengetahui adanya transaksi over kredit mobil?

Jawab: tidak mengetahui.

HASIL WAWANCARA PIHAK KEDUA (MUHAL)

Nama : Bapak Haryana

Jabatan : Pimpinan Bank BJB Syariah Majalengka

1. Apakah anda bekerjasama dengan pihak dealer atau serum dalam melunasi kendaraan?

Jawab: tidak karena bank sendiri menyediakan produk akad murabahah dalam pembelian kendaraan yang diinginkan oleh nasabah.

2. Bagaimana prosesnya dan pembayarannya?

Jawab: nasabah datang kebank dengan memberi tahu type motor yang diinginkan dengan memberikan uang DP sebesar 20% dari harga motor yang diinginkan. Kemudian bank membeli motor tersebut secara lunas. Terkait pembayaran nasabah, boleh dilakukan secara kredit maupun cash.

3. Berapa margin yang didapat dari akad tersebut?

Jawab: 16%

4. Bagaimana resiko apabila nasabah melakukan take over/over kredit motor tersebut tanpa sepengetahuan pihak bank?

Jawab: jika transaksi tidak diketahui pihak bank, maka motor tersebut diambil oleh pihak bank dan melakukan akad atau transaksi baru. Karena hal ini mempengaruhi asuransi fidusia kendaraan nasabah. Adapun beban biaya yang ditanggung terkait pembuatan jaminan fidusia menjadi ketentuan notaris.

HASIL WAWANCARA PIHAK KETIGA (*Muhal alaihi*)

Nama : bos Surya

Usia : 53 thn

1. Sejak kapan anda membeli mobil secara over kredit?

Jawab: sejak tahun 1998

2. Apa alasan anda membeli mobil secara over kredit?

Jawab: membutuhkan mobil untuk keperluan pengiriman barang sedangkan biaya tidak mencukupi.

3. Bagaimana proses anda ketika melakukan over kredit mobil?

Jawab: ada penawaran over kredit mobil dari orang Maja dengan syarat meneruskan pembayaran kredit mobil sebesar 800.000 yang diangsur perbulan melalui bank BCA Ciamis dan pemngembalian DP (*down of payment*) sebesar 5 juta.

4. Bagaimana resiko membeli mobil secara over kredit?

Jawab: BPKB belum dialih namakan. Sehingga dalam pembayaran harus lancar.

5. Mengapa BPKB masih atas nama pihak pertama?

Jawab: karena ketidak tahuan pihak bank. Sehingga tidak perlu ada biaya tambahan untuk pengalihan sebesar 5 juta.

6. Apakah pihak bank mengetahui adanya transaksi over kredit?

Jawab: tidak mengetahui.



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
KECAMATAN SUKAHAJI**

Alamat : Jln. Pangeran Muhamad No. 30 T. (0233) 283039 Sukahaji - Majalengka

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 070/462/Kec.

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a	:	LUBNA LAELATUL FARHAN
No. Induk Mahasiswa	:	132311093
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas	:	Syari'ah dan Hukum
		UIN Walisongo Semarang

Benar telah melakukan penelitian di Kecamatan Sukahaji guna penyusunan skripsi dengan judul "PENERAPAN AKAD HAWALAH DALAM TRANSAKSI OVER KREDIT KENDARAAN DITINJAU BERDASARKAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO:12/DSN-MUI/IV/200 (STUDI KASUS KECAMATAN SUKAHAJI KABUPATEN MAJALENGKA", sejak bulan Juni s.d Agustus 2017.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk untuk digunakan sebagaimana mestinya..

Sukahaji, 05 September 2017
CAMAT SUKAHAJI,

Drs. OMAN SURATMAN, M.Si.
Pembina Tk. I
NIP. 19630624 198903 1 005



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp. (021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 12/DSN-MUI/IV/2000

Tentang

HAWALAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang :
- a. bahwa terkadang seseorang tidak dapat membayar utang-utangnya secara langsung; karena itu, ia boleh memindahkan penagihannya kepada pihak lain, yang dalam hukum Islam disebut dengan hawalah, yaitu akad pengalihan utang dari satu pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung (membayar)-nya;
 - b. bahwa akad hawalah saat ini bisa dilakukan oleh LKS;
 - c. bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang hawalah untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat :

1. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ.

"Menunda-nunda pembayaran utang yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman. Maka, jika seseorang di antara kamu dialihkan hak penagihan piutangnya (dihawalahkan) kepada pihak yang mampu, terimalah" (HR. Bukhari).

2. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf:

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا.

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

3. Ijma. Para ulama sepakat atas kebolehan akad hawalah.
4. Kaidah fiqh:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Bahaya (beban berat) harus dihilangkan.”

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Kamis, tanggal 8 Muharram 1421 H./13 April 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG HAWALAH

Pertama : Ketentuan Umum dalam Hawalah:

1. Rukun hawalah adalah *muhil* (المُحِيل), yakni orang yang berutang dan sekaligus berpiutang, *muhal* atau *muhtal* (المُحَال أو المحتال), yakni orang berpiutang kepada muhil, *muhal 'alaih* (المُحَال عَلَيْهِ), yakni orang yang berutang kepada muhil dan wajib membayar utang kepada muhtal, *muhal bih* (المُحَال بِهِ), yakni utang muhil kepada muhtal, dan *sighat* (ijab-qabul).
2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
3. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.
4. Hawalah dilakukan harus dengan persetujuan muhil, muhal/muhtal, dan muhal 'alaih.
5. Kedudukan dan kewajiban para pihak harus dinyatakan dalam akad secara tegas.
6. Jika transaksi hawalah telah dilakukan, pihak-pihak yang terlibat hanyalah muhtal dan muhal 'alaih; dan hak penagihan muhal berpindah kepada muhal 'alaih.

Kedua : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 08 Muharram 1421 H.
13 April 2000 M

DEWAN SYARI'AH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,

Prof. KH. Ali Yafie

Sekretaris,

Drs. H.A. Nazri Adlani





مَجْلِسُ الْإِسْلَامِ الْإِنْدُونِيسِي

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp.(021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
NO: 58/DSN-MUI/V/2007

Tentang
HAWALAH BIL UJRAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN_MUI) setelah:

- Menimbang :
- a. bahwa fatwa DSN No.12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hawalah belum mengatur *hawalah muthlaqah* dan ketentuan *ujrah/fee* dalam *hawalah*;
 - b. bahwa akad *Hawalah bil ujah* diperlukan oleh lembaga keuangan syariah (LKS) guna memenuhi kebutuhan objektif dalam rangka memberikan pelayanan terhadap nasabah;
 - c. bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang *Hawalah bil Ujah* untuk dijadikan pedoman.

- Mengingat :
1. Firman Allah s.w.t.; antara lain:
 - a. QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

“Hai orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...”

- b. QS.al-Baqarah [2]: 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَخْسِ مِنْهُ شَيْئًا...

“Hai orang yang beriman! Apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya....”

2. Hadis Nabi s.a.w.; antara lain:

- a. Hadis Nabi riwayat Imam al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda:

مَطْلُ الْعِنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أَتْبَعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ.

“Menunda-nunda pembayaran utang yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman. Maka, jika seseorang di antara kamu dialihkan hak penagihan piutangnya (dihawalahkan) kepada pihak yang mampu, terimalah” (HR. Bukhari).

- b. Hadis Nabi riwayat Imam al-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani, Nabi s.a.w. bersabda:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا.

“Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

- c. Hadis Nabi riwayat Imam Ahmad dan al-Baihaqi dari Ibnu Umar, Nabi s.a.w. bersabda:

مَنْ أَحْبَلَ بِحَقِّهِ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَحْتَلْ.

“Siapa saja yang dialihkan hak-nya pada yang mampu maka dia harus menerima pengalihan itu.”

- d. Hadis Nabi riwayat Imam Baihaqi dari Abu Hurairah serta ‘Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ.

“Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.”

2. Ijma’. Para ulama sepakat atas kebolehan akad hawalah.

3. Kaidah Fikih:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Bahaya (beban berat) harus dihilangkan.”

Memperhatikan : 1. Pendapat para ulama, antara lain Mushthafa ‘Abdullah al-Hamsyari sebagaimana dikutip oleh Syaikh ‘Athiyah Shaqr,

dalam kitab *Ahsan al-Kalam fi al-Fatawa wa al-Ahkam*, jilid 5, hal. 542-543:

إِنَّ الْإِعْتِمَادَاتِ الْمُسْتَنْدِيَّةَ الَّتِي يَتَعَهَّدُ فِيهَا الْبَنْكُ لِلْمُصَدِّرِ بِدَفْعِ الْمُسْتَحَقَّاتِ لَهُ عَلَى الْمُسْتَوْدِعِ جَائِزَةٌ، وَالْأَجْرُ الَّذِي يُؤْخَذُ فِي مُقَابِلِهَا جَائِزٌ. وَخَرَجَ الْجَوَازُ عَلَى أَنَّ طَبِيعَةَ هَذَا التَّعَامُلِ تَدُورُ بَيْنَ الْوَكَالَةِ وَالْحَوَالَةِ وَالضَّمَانِ. وَالْوَكَالَةُ بِأَجْرٍ لَا حُرْمَةَ فِيهَا، وَكَذَلِكَ الْحَوَالَةُ بِأَجْرٍ. وَالضَّمَانُ بِأَجْرٍ خَرَجَهُ عَلَى ثَمَنِ الْجَاهِ الَّذِي قِيلَ فِيهِ بِالْحُرْمَةِ وَبِالْكَرَاهَةِ، وَقَالَ بِجَوَازِهِ الشَّافِعِيُّ، كَمَا خَرَجَهُ عَلَى الْجُعَالَةِ الَّتِي أَحَازَهَا الشَّافِعِيُّ أَيْضًا.

وَتَحَدَّثَ عَنْ خَطِّابَاتِ الضَّمَانِ وَأَنْوَاعِهَا، وَهِيَ الَّتِي يَتَعَهَّدُ فِيهَا الْبَنْكُ بِمَكْتُوبٍ يُرْسَلُهُ --بِنَاءٍ عَلَى طَلَبِ عَمِيلِهِ-- إِلَى دَائِنِ الْعَمِيلِ يَضْمَنُ فِيهِ تَنْفِيذَ الْعَمِيلِ لِاتِّزَامَاتِهِ، وَقَالَ إِنَّهَا جَائِزَةٌ. وَخَرَجَ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهَا وَكَالَةٌ أَوْ كِفَالَةٌ، وَهُمَا جَائِزَتَانِ، وَالْعُمُولَةُ عَلَيْهِمَا لَا حُرْمَةَ فِيهَا. وَاعْتَمَدَ فِي دِرَاسَتِهِ عَلَى الْمَرَاجِعِ وَالْمَصَادِرِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ وَعَلَى كُتُبِ الْفِقْهِ فِي الْمَذَاهِبِ الْمُخْتَلِفَةِ.

“*Letter of Credit (L/C)* yang berisi ketetapan bahwa bank berjanji kepada eksportir untuk membayar hak-haknya (eksportir) atas importir adalah boleh. Upah yang diterima oleh bank sebagai imbalan atas penerbitan L/C adalah boleh. Hukum “boleh” ini oleh Muhsthaful al-Hamsyari didasarkan pada karakteristik muamalah L/C tersebut yang berkisar pada akad *wakalah*, *hawalah* dan *dhaman (kafalah)*. *Wakalah* dengan imbalan (*fee*) tidak haram; demikian juga (tidak haram) *hawalah* dengan imbalan.

Adapun *dhaman (kafalah)* dengan imbalan oleh Musthafa al-Hamsyari disandarkan pada imbalan atas jasa jah (*dignity*, kewibawaan) yang menurut mazhab Syafi’i, hukumnya boleh (*jawaz*) walaupun menurut beberapa pendapat yang lain hukumnya haram atau makruh. Musthafa al-Hamsyari juga menyandarkan *dhaman (kafalah)* dengan imbalan pada *ju’alah* yang dibolehkan oleh madzhab Syafi’i.

Mushthafa ‘Abdullah al-Hamsyari juga berpendapat tentang bank garansi dan berbagai jenisnya. Bank garansi adalah dokumen yang diberikan oleh bank --atas permohonan nasabahnya-- yang berisi jaminan bank bahwa bank akan memenuhi kewajiban-kewajiban nasabahnya terhadap rekanan nasabah. Musthafa menyatakan bahwa bank garansi hukumnya boleh. Bank garansi tersebut oleh Musthafa disejajarkan dengan *wakalah* atau *kafalah*; dan kedua akad ini hukumnya boleh. Demikian juga pengambilan imbalan (*fee*) atas kedua akad itu tidak diharamkan.

2. Pendapat peserta Rapat Pleno DSN-MUI pada hari Rabu, 13 Jumadil Awal 1428 H. / 30 Mei 2007.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **FATWA TENTANG HAWALAH BIL UJRAH**

Pertama : **Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan

- a. *Hawalah* adalah pengalihan utang dari satu pihak ke pihak lain, terdiri atas *hawalah muqayyadah* dan *hawalah muthlaqah*.
- b. *Hawalah muqayyadah* adalah hawalah di mana *muhil* adalah orang yang berutang kepada *muhal* sekaligus berpiutang kepada *muhal 'alaih* sebagaimana dimaksud dalam Fatwa No.12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hawalah.
- c. *Hawalah muthlaqah* adalah hawalah di mana *muhil* adalah orang yang berutang tetapi tidak berpiutang kepada *muhal 'alaih*;
- d. *Hawalah bil ujrah* adalah hawalah dengan pengenaan *ujrah/fee*;

Kedua : **Ketentuan Akad**

1. *Hawalah bil ujrah* hanya berlaku pada *hawalah muthlaqah*.
2. Dalam *hawalah muthlaqah*, *muhal 'alaih* boleh menerima *ujrah/fee* atas kesediaan dan komitmennya untuk membayar utang *muhil*.
3. Besarnya *fee* tersebut harus ditetapkan pada saat akad secara jelas, tetap dan pasti sesuai kesepakatan para pihak.
4. Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
5. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern;
6. *Hawalah* harus dilakukan atas dasar kerelaan dari para pihak yang terkait.
7. Kedudukan dan kewajiban para pihak harus dinyatakan dalam akad secara tegas.
8. Jika transaksi *hawalah* telah dilakukan, hak penagihan *muhal* berpindah kepada *muhal 'alaih*.
9. LKS yang melakukan akad *Hawalah bil Ujrah* boleh memberikan sebagian *fee hawalah* kepada *shahibul mal*.

Ketiga : **Ketentuan Penutup**

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah atau Pengadilan Agama setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 13 Jumadil Awal 1428 H
30 Mei 2007 M

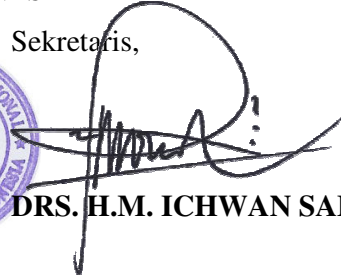
**DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,



DR. K.H. M.A. SAHAL MAHFUDH

Sekretaris,



DRS. H.M. ICHWAN SAM

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DATA PRIBADI

Nama : Lubna Laelatul Farhan
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Majalengka, 16 November 1995
Alamat Asal : Jl. Pangeran Muhamad No. 3 Blok Kliwon
Ds. Salagedang Kec. Sukahaji Kab.
Majalengka Jawa Barat
Alamat Sekarang : Jl. Wahyu Asri Utara IV No. CC 161B Rt
06/Rw 05 Tambak Aji Ngalian Semarang
Jawa Tengah
Email : flubna95@gmail.com
Motto : berdoa, berusaha dan bersyukur

DATA PENDIDIKAN

Pendidikan Formal

- | | |
|--|------------|
| 1. TK Kartini | Lulus 2001 |
| 2. SDN Salagedang 2 | Lulus 2007 |
| 3. MTsN Sukamanah Tasikmalaya | Lulus 2010 |
| 4. MA Alhikmah 2 Benda Sirampog Brebes | Lulus 2013 |
| 5. UIN Walisongo Semarang | Lulus 2018 |

Semarang, 21 Desember 2017

Hormat Saya

Lubna Laelatul Farhan